



**RADIKALISASME
DI PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI
(STUDI KASUS DI IAIN AMBON)**

**Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag
Farid Naya, M.Si**

**LP2M IAIN AMBON
2020**

**RADIKALISASME
DI PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI
(STUDI KASUS DI IAIN AMBON)**

Penulis :

Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag

Farid Naya, M.Si

ISBN: 978-623-6830-14-7

Editor: Zainal Arifin Sandia

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon

Desain Sampul dan Tata Letak: Sdesign

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon

97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: Lp2miainambon16@gmail.com

publikasilp2miainambon@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta yang dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah adalah ucapan yang pantas kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang karena rahman dan rahim-Nya, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penelitian dengan judul “Radikalisme di Perguruan Tinggi Islam Negeri (Studi Kasus di IAIN Ambon)” dapat kami dapat menyelesaikan.

Shalawat dan Salam, juga kami khaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi Muhammad Saw, sosok transformator yang memabawakan manusia dari kegelapan kepada pencerahan (*min al-dhulumat ila an-nur*) dan figur teladan kemanusiaan yang beradab (*uswatun hasanah*). Semoga kita menjadi pewarisnya, insya Allah, amin.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan penting. Pertama, Sejauhmana IAIN Ambon terpapar paham radikalisme? Kedua, bagaimana bentuk paham radikalisme yang berkembang di IAIN Ambon? Dan ketiga, bagaimana cara IAIN Ambon menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan IAIN Ambon?

Paling tidak, dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut gambaran tentang realitas radikalisme berikut solusi dan resolusi pencegahannya dapat dirumuskan lebih kontekstual, responsif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penting disadari dan diperhatikan bahwa pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini juga melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, kami memandang pantas untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Narasumber, mahasiswa dan dosen, yang dengan keterbukaan, kejujuran dan ketulusan memberikan informasi terkait obyek penelitian ini.
2. Nurlaiha Ibrahim dan Muhammad Amin, yang telah bekerja keras membantu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Akhirnya, peneliti tidak bida tidak mengakui, bahwa hasil penelitian ini masih perlu lebih jauh dikembangkan dan diperdalam agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena dan realitas radikalisme di kampus, IAIN Ambon.

Ambon, 9 September 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

Cover-i

Katalog-ii

Kata Pengantar-iii

Daftar Isi-v

BAB I PENDAHULUAN-1

- A. Latar Belakang-1
- B. Rumusan Masalah-3
- C. Batasan Masalah-3
- D. Tujuan Penelitian-3
- E. Singifikasi-4
- F. Kajian Sebelumnya-4
- G. Kerangka Teori-5
- H. Metode Penelitian-6
 - 1. Lokasi penelitian-6
 - 2. Tipe dan jenis penelitian-6
 - 3. Tipe data yang dikumpulkan-6
 - 4. Metode pengumpulan data-7

BAB II SETTING LOKASI PENELITIAN-9

- A. Sejarah IAIN Ambon-9
- B. Visi dan Misi IAIN Ambon-12
- C. IAIN Ambon dan Dinamika Pasca Konflik-21

BAB III RADIKALISME DI IAIN AMBON-31

- A. Memahami Radikalisme-31
- B. Fenomena Radikalisme di Kampus-40
- C. Radikalisme di IAIN Ambon-48

BAB IV RESPON IAIN Ambon TERHADAP RADIKALISME-62

- A. Membumikan visi Multikultural-62
- B. Mengembangkan paham Islam washatiyah-70
- C. Mengembangkan Kampus Sensitif Radikalisme-77

BAB V PENUTUP-83

- A. Kesimpulan-83
- B. Saran-84

DAFTAR KEPUSTAKAAN-86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2018, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaparkan dua temuan survei yang sangat mengagetkan dan satu temuan menggembirakan. Dua temuan mengagetkan dimaksud adalah pertama, temuan BIN tentang 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Kedua, temuan BNPT tentang tujuh Perguruan Tinggi (PT) yang terpapar paham radikalisme. Ketujuh PT tersebut yaitu UI, ITB, IPB, Undip, hingga Institut ITS, Unair, dan UB . Data ini, lebih jauh, mendapat pembenaran dari Badan Intelijen Negara (BIN), bahwa 39 persen mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia, simpatik terhadap gerakan radikalisme. Dan satu temuan menggembirakan yaitu tingginya kepercayaan masyarakat di 32 provinsi terhadap kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme (63,60%) .

Temuan ini menjadi sebuah tamparan keras bagi dunia PT oleh karena dipandang sebagai arena akademik, memiliki parameter tersendiri dalam menilai sebuah kebenaran dan menjunjung tinggi semangat keterbukaan untuk mendorong terjadinya perubahan yang transformatif, berkeadaban dan berperadaban. Kampus dinilai sebagai sebuah pranata dengan imun yang sangat baik dan kuat dalam merespon setiap persoalan yang kontra produktif dengan nilai-nilai, spirit dan falsafah yang membentuk jati diri, karakteristik dan identitasnya. Oleh karenanya, temuan BIN dan BNPT terasa aneh dan mengundang pertanyaan yang demikian memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Tapi, kenyataan ini tak terbantahkan. Dan itu berarti, ada kekeliruan yang terjadi di arena PT.

Konflik Maluku (1999-2003) mewarisi persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Salah satu dampak paling seriusnya adalah segregasi. Baik segregasi wilayah maupun segregasi mind set dalam berbudaya dan beragama. Dampak ini hari ini menjadi bom waktu akibat proses social recovery yang melulu terkonsentrasi di Kota Ambon. Sementara, daerah-daerah yang berada di luar Kota Ambon nyaris tak terjamah oleh proses ini. Dan sebagai dampak turunannya kemudian setiap tahun Kota Ambon sebagai epicentrum dinamika kekuasaan dihadapkan pada gelombang persoalan segregasi wilayah dan mind set berbudaya dan beragama yang di bawah oleh mahasiswa baru.

Kenyataan ini membuka ruang kosong yang memungkinkan diisi oleh kelompok-kelompok yang memiliki cara pandang beragama radikal atau radikalisme. Oleh karena, di satu sisi, segregasi mengakibatkan mewarisi narasi-narasi konflik secara sepihak, berpotensi membentuk eksklusifisme dan cenderung dalam prejudice, stereotype dan stigma terhadap orang yang berbeda, bertemu dengan cara pandang beragama dan ideologi radikalisme yang juga eksklusif, melakukan propaganda dan agitasi dengan dalih takfiri, jihadis dan lain sebagainya.

Dalam konteks IAIN Ambon sebagai kampus multikultural, dampak segregasi dan fenomena radikalisme menjadi persoalan sangat serius. Oleh sebab itu, penelitian ini dibutuhkan memahami sejauh mana dampak segregasi tersebut berkelindan dengan sebaran paham radikalisme, baik secara langsung face to face atau pengkaderan maupun lewat media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tiga masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sejauhmana IAIN Ambon tepapar paham radikalisme?
2. Bagaimana bentuk paham radikalisme yang berkembang di IAIN Ambon?
3. Bagaimana cara IAIN Ambon menangkal penyebaran paham radikalisme di lingkungan IAIN Ambon?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus atau tidak melebar dan apalagi bias, maka dipandang penting untuk membuat batasan masalahnya. Terkait itu, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Proses kemunculan paham radikalisme di IAIN Ambon?
2. Identifikasi bentuk paham radikalisme yang berkembang di IAIN Ambon.
3. Respon IAIN Ambon terhadap perkembangan paham radikalisme di lingkungan IAIN Ambon.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang jelas dan ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses kemunculan paham radikalisme di IAIN Ambon.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk paham radikalisme yang berkembang di IAIN Ambon.
3. Untuk menjelaskan respon IAIN Ambon menyikapi perkembangan radikalisme di lingkungan IAIN Ambon.

E. Signifikansi

Kontribusi dari sebuah penelitian adalah hal yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan, program atau kebijakan yang dibutuhkan untuk memecahkan dan mencari jalan keluar penyelesaian persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, diharapkan penelitian akan:

1. Menemukan pola penyebaran paham radikalisme di IAIN Ambon.
2. Menenjelaskan status kerawanan ancaman paham radikalisme terhadap IAIN Ambon sebagai satu-satunya lembaga pendidikan Islam negeri di Maluku.
3. Memberikan solusi dan resolusi untuk pencegahan paham radikalisme di lingkungan IAIN Ambon secara berkelanjutan.

F. Kajian Riset Sebelumnya

Dr. Duriana pada tahun 2013 telah melakukan sebuah penelitian dengan konsentrasi Radikalisme Agama Pasca Konflik di Maluku . Penelitian ini lebih fokus membahas Hizbut Tahrir dan Jama'ah Salafi Ahlusunnah wa al-Jama'ah yang berkembang di luar kampus. Pada tahun 2016, Dr. Abd. Rauf (dkk.) melakukan penelitian tentang Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme dan Gerakan Deradikalisasi di Indonesia: Studi Kasus di Maluku . Penelitian ini juga tidak menjadikan kampus sebagai obyek kajiannya.

Tahun 2017, PPIM UIN Syarif Hidayatullah melakukan penelitian di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Penelitian tentang Database Salafi di Indonesia: Potret Aktor, Peran dan Jaringan ini tidak mengidentifikasi sejauhmana ajaran salafi berpotensi atau bertransformasi menjadi paham radikalisme. Pada tahun yang saman, sebuah tim penliti dari PusPIDeP Pascasarjana UIN Sunankalijaya

Yogyakarta tiba di Ambon dan melakukan penelitian tentang Literatur Keagamaan di Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi . Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sampai mengungkap fakta penyebaran paham radikalisme di kampus.

Pada tahun 2018, tim peneliti dari PusPIDeP Pascasarjana UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta, kemabali melakukan peneltian di Ambon. Kali ini fokus penelitiannya tentang Ulama, Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Indonesia . Lagi dan lagi, penelitian ini tidak menyasar pada fenomena radikalisme di kampus.

G. Kerangka Teori

Untuk menganalisis fenomena radikalisme, penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut teori ini suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, amupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya, dimana kelompok yang dominan tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*). Teori yang diperkenalkan Anthony Oberchall ini mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat dimana timbul ketidakpastian, maka cukup memungkinkan untuk memunculkan gerakan sosial. Istilah mobilisasi dalam konteks ini mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, sosiasi dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif .

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitiannya, maka penelitian ini dilaksanakan dan mengambil lokasi di Kampus IAIN Ambon, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

2. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis ini dilakukan untuk untuk menggali informasi secara luas dan mendalam yang didukung oleh data-data yang memadai mengenai peran subyek baik personal maupun institusi yang terkait secara langsung dengan obyek penelitian.

3. Tipe data yang akan dikumpulkan

Tipe data yang akan dikumpulkan meliputi tiga kategori yang berbeda. Kategori pertama terdiri dari data pada level individual berdasarkan latar belakang gender, pendidikan, pekerjaan, dan usia. Kategori kedua adalah data tingkat struktural yang meliputi latar belakang desa dari responden dan tingkat perkembangan tempat tinggal responden. Sebagai tambahan Kategori ketiga, yaitu dikumpulkan adalah voting decisions dari responden berdasarkan referensi pilihan latar belakang seseorang yang menjadi rujukan dan dasar pertimbangan yang digunakan untuk memilih yang lain.

Analisis studi ini tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga meliputi analisis institusi. Artinya sikap dan persepsi responden terhadap kebijakan institusi adat, agama,

pendidikan maupun pemerintah bukan semata-mata dianggap sebagai pribadi, tetapi juga merupakan ekspresi yang merepresentasikan kelompok rujukannya.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data atau informasi dengan tingkat kualifikasi yang baik dan tervalidasi dalam penelitian ini, maka pilihan teknik pengumpulan data memegang peran sangat signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi. Teknik pengumpulan data lewat observasi langsung ini dilakukan melalui observasi partisipasi dan observasi tidak terstruktur. Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data atau informasi penelitian melalui pengamatan dan penginderaan langsung peneliti terhadap informan. Sementara itu, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- b. Angket (self-administrated quitionnaire) adalah pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan (respons) atas -- atau menjawab -- pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- c. Wawancara. Teknik ini terbagi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara tidak terstruktur adalah sebuah proses wawancara yang berlangsung dengan menggunakan instrumen penelitian yang berisikan beberapa pertanyaan pemberlakuannya

bersifat umum dan terstandar. Adapun wawancara mendalam adalah dilakukan untuk mengetahui lebih jauh atau memahami lebih dalam persoalan atau jawaban di balik jawaban-jawaban yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian.

BAB II

SETTING LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah IAIN Ambon

Maluku sebelumnya secara geografis dan administratif masih mencakup Maluku Utara. Terletak di bagian timur Indonesia, Maluku adalah daerah dengan luas wilayah yang sangat luas dengan karakteristik kepulauan. Kondisi demikian menjadikan Maluku menjadi daerah yang memiliki persoalan dengan tingkat kompleksitas tersendiri. Tidak semata karena persoalan geografis yang kepulauan dan terletak di wilayah timur Indonesia, tapi juga dampak ikutan yang timbulkan akibat persoalan geografis tersebut, yaitu akses terhadap sumber-sumber pembangunan dan pengembangan pembangunan daerah. Salah satunya adalah akses terhadap sumber kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi Islam.

Sebelum ada IAIN Ujungpandang Cabang Ambon, orang-orang Maluku yang akan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam, akhirnya harus ke IAIN Ujungpandang di Sulawesi Selatan dan beberapa IAIN di pulau Jawa. Kondisi ini berlangsung kira-kira dari tahun 1960-an. Sangat mungkin, tingginya animo masyarakat Maluku untuk berkuliah di IAIN yang menjadi salah satu faktor, sehingga pada tahun 1960-an gagasan tentang menghadirkan IAIN di Ambon pertama kali menggema. Selain, tentu saja juga faktor *syi'ar* atau dakwah Islam, akses terhadap Pendidikan Tinggi Islam dan pengembangan sumber daya umat Islam di Maluku.

Meski gagasan untuk pembangunan IAIN di Maluku sudah bergulir sekitar tahun 1960-an itu, akan tetapi, nanti pada tahun 1970-an gagasan ini baru terealisasi ditandai dengan dibukanya beberapa fakultas berstatus filial dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta di Ambon. Hanya bertahan setahun

fakultas-fakultas tersebut mengalami stagnan dan akhirnya terhenti. Jarak yang jauh, infrastruktur dan sarana komunikasi yang tidak mendukung menjadi faktor penyebabnya.

Di awal tahun 1980-an, gagasan untuk membangun IAIN di Maluku kembali muncul. Jika sebelumnya inisiatifnya bersifat *top down* (dari Pusat, Jakarta), maka kali ini inisiatifnya muncul secara *button up* oleh Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Maluku. Dan untuk kali ini, IAIN di Ambon tidak lagi didorong untuk menjadi filial dari IAIN Jakarta karena alasan jauhnya jarak antara Jakarta dan Ambon, akan tetapi diusulkan menjadi filial atau cabang dari IAIN Alauddin Ujungpandang. Gagasan ini berbuah hasil. Pada tahun 1982, Fakultas Syari'ah didirikan di Maluku dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Peradilan Agama (PA) dan Jurusan Pidana Perdata (PP). Setahun kemudian, 1983, didirikan lagi Fakultas Ushuluddin, juga dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Aqidah Filsafat (AF) dan Jurusan Dakwah. Pada tahaun-tahun awal, konsentrasi aktifitas seluruh fakultas berpusat di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Berjarak sekita 25 Km dari Kota Ambon.

Pada tahun 1988, status cabang atau filial IAIN Ujungpandang di Ambon bertransformasi menjafi fakultas defenitif ke-15 dan ke-16 dari IAIN Ujungpandang menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 dan Surat Keputusan (SK) Mentri Agama RI Nomor 18 Tahun 1988. Peresmian kedua fakultas defenitif baru ini, Syari'ah dan Ushuluddin, ditandai dengan pelantikan dekan defenitif pada kedua fakultas pada tanggal, 28 Agustus 1988, sesuai Surat Keputusan (SK) Mentri Agama RI Nomor: B.II/3/7620/1988 tertanggal 5 Juli 1988.

Pada tahun 1995, gagasan untuk menjadikan IAIN Ambon sebagai sebuah IAIN yang mandiri, berdiri sendiri atau terlepas dari IAIN Ujungpandang bergulir. Gagasan ini dipandang memungkinkan karena IAIN Ujungpandang di Ambon dipandang telah memenuhi syarat, yaitu telah memiliki 3 fakultas, 2 fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin di Ambon dan Fakultas Tarbiyah di Ternate. Setelah berproses kurang lebih dua tahun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997, IAIN Ujungpandang Cabang Ambon bertransformasi menjadi STAIN Ambon. SK Presiden ini kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 284, tanggal 16 Juni 1997 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Dirjen. Bimbingan Islam Departemen Agama RI Nomor: E/136/1979, tertanggal 30 Juli 1997 yang mengatur tentang struktur organisasi STAIN.

Pada tahun 2006, STAIN Ambon kemudian bertransformasi lagi menjadi IAIN Ambon berdasar pada Surat Keputusan (SK) Presiden RI Nomor: 111 Tahun 2006, tertanggal 29 Desember 2006. Ini adalah transformasi yang ketiga setelah sebelumnya pada transformasi pertama dari cabang IAIN Ujungpandang di Ambon menjadi Fakultas-fakultas IAIN Ujungpandang di Ambon (1995). Kemudian transformasi kedua, yaitu dari Fakultas-fakultas IAIN Ujungpandang di Ambon menjadi STAIN Ambon (1977).

Dalam usianya yang ke-13 tahun, seiring dengan kecenderungan perkembangan dan perubahan zaman yang berjalan demikian cepat IAIN Ambon kembali dituntut untuk melakukan transformasi, menjadi UIN Imam Rijali Ambon. Usaha ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2015, munculnya kebijakan moratorium transformasi kelembangaan pendidikan tinggi agama negeri oleh Kemenag pada tahun

2017, mengakibatkan usaha itu terhenti, hingga pencabutan moratorium yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Merespon waktu pencabutan moratorium tersebut, pada akhir 2019 IAIN Ambon diundang kembali untuk melakukan presentasi proposal alih status dari IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Rijali Ambon. Hasilnya, IAIN Ambon dinyatakan lulus dan dapat berproses ke tahap selanjutnya, yaitu visitasi. Visitasi pertama, dari tim Kemertrian Agama Republik Indonesia ke IAIN Ambon terjadi pada Desember 2019 dan kemudian visitasi oleh tim dari Kemetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia berlangsung pada Januari 2020.

Sampai dengan awal Sepetember 2020, proses perkembangan alih status IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Rijali Ambon sudah berada di Kemanpan-RB. Ini berarti bahwa transformasi keempat, yaitu dari IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Rijali Ambon akan terjadi pada tahun ini. Transformasi ini adalah sebuah kebutuhan kontekstual masyarakat muslim Maluku hari ini. Oleh karenanya, realisasinya berarti pemenuhan atas kebutuhan masyarakat Maluku itu.

B. Visi dan Misi IAIN Ambon

Tidak lagi sekedar menjadi sebuah fenomena, kecenderungan umum atau kepentingan *an sich*, sehingga sebuah visi dirumuskan. Dengan kata lain, sebuah visi tidak cukup dimengerti, dipahami dan disadari hanya sebatas susunan beberapa kata atau sebuah kalimat yang tertata indah, sistematis dan berdaya pesona, yang dirumuskan guna memenuhi kepentingan yang sifatnya formalitas belaka dari seseorang, sebuah komunitas, suatu masyarakat, satu instansi,

lembaga, organisasi atau perusahaan tertentu. Akan tetapi, sebuah visi dirumuskan pada sejatinya adalah representasi terjemahan dari semesta kehendak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pendeknya, visi adalah kebutuhan.

Menurut Fred R. David, “*A vision statement should answer the basic question, “What do we want to become?”*. *The vision statement should be short, preferably one sentence....*”¹ Jika diterjemahkan, maka pengertian visi menurut Fred tersebut dapat diartikan sebagai berikut: bahwa visi merupakan sebuah pernyataan berupa jawaban atas pertanyaan dasar, “kita mau menjadi seperti apa?” Visi sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sebuah pernyataan yang pendek, lebih baik dalam satu kalimat. Sementara, menurut Sofjan Assari, visi adalah pernyataan sederhana untuk mengarahkan sebuah organisasi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu panjang.²

Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan sebuah visi setidaknya memenuhi dua kebutuhan sekaligus. Kebutuhan pertama adalah memenuhi jawaban pertanyaan kita hendak menjadi apa. Dan kebutuhan kedua, yaitu konteks sifat waktunya yang berjangka panjang. Ini berarti, bahwa sebuah visi memerlukan penerjemahan lebih lanjut dalam bentuk misi agar dapat diperoleh gambaran yang lebih realistis tentang sebuah misi.

Dalam kaitan itu, Patric Hull mengatakan bahwa perumusan misi harus menjawab empat pertanyaan, yaitu *what we do?* (“apa yang kita lakukan?”), *how do we do it?*

¹ Fred R. David, *Strategic Management Concepts And Cases*, New Jersey: Prentice Hall, Ed. XIII, 2011, h. 43.

² Sofjan Assauri, *Strategic Management Edisi 2*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, h. 17.

("bagaimana kita melakukannya?"), *whome do we do it for?* ("untuk siapa kita melakukannya?") dan *what values are we bringing?* ("nilai apa yang kita bawa?").³ Jadi, sebuah misi setidaknya menjelaskan empat hal secara umum, yaitu tujuan, strategi, target dan nilai atau kemanfaatan. Keempatnya merupakan satu kesatuan yang integral sebagai sebuah sinegi. Oleh sebab itu, rumusan-rumusan misi harus secara benar mempertimbangkan aspek komprehensifitas dalam perumusannya. Antara satu misi dengan misi lainnya adalah pilar-pilar yang dibangun semetris sebagai penopang sebuah visi.

Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sekarang perumusannya dimulai dari dan pada pelaksanaan kegiatan Workshop Desain Envisioning dan SOP IAIN Ambon, yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM), tanggal 21-22 Juni 2013 di Lt. III Gedung Rektorat IAIN Ambon. Lewat workshop ini disepakati dua poin penting, mendasar dan substantif terkait untuk kebutuhan perumusan visi, yaitu keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Keyakinan Dasar dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dimkasud adalah "Bekerja secara profesional, kompetitif, produktif dilandasi dengan nilai-nilai religius". Sementara, nilai-nilai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon adalah sebagai berikut, yaitu: religius, profesional, jujur, transparant dan inovatif.⁴

³ Patrick Hull, *Answer 4 Questions to Get a Great Mission Statement*, Forbes, 10 Januari 2013. Lihat: <https://www.forbes.com/sites/patrickhull/2013/01/10/answer-4-questions-to-get-a-great-mission-statement/#22fcc98b67f5>

⁴ Lihat, Berita Acara *Workshop Desain Envisioning dan SOP IAIN Ambon*, tanggal 21-22 Juni 2013.

Demokratis berarti bahwa tiap proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi atau demokratis. Kemandirian yang dimaksud adalah keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Profesional bermakna kepandaian khusus yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ukhuwah maksudnya persaudaraan dalam Islam. Dan religius bermakna bersifat religi/keagamaan yang berarti percaya akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah sebuah tim kecil dengan tujuan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar IAIN Ambon hasil dari *Workshop Envisioning* IAIN Ambon tersebut, berikut perumusannya dalam bentuk sebuah narasi visi, yang kemudian menjadi visi IAIN Ambon. Menurut Dr. Abidin Wakano, beberapa nama yang mengisi tim kecil antara lain adalah dirinya, Dr. Basman dan Dr. Subair.

Meski tim kecil sudah dibekali dengan modal keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar IAIN Ambon, hal itu tidak lantas membantu meringankan begitu saja kerja tim kecil. Oleh karena, tim kecil tidak bisa tidak memberikan berbagai pertimbangan yang dibutuhkan, sehingga visi yang akan dirumuskan dan dihasilkan secara kontekstual mampu menjelaskan keberadaan, posisi, peran dan tanggung jawab IAIN Ambon dalam konteks dinamika kehidupan Maluku, nasional dan internasional. Beberapa pertimbangan dimaksud⁶ antara lain adalah:

⁵ Samad Umarella, *Dokumen Envisioning IAIN Ambon*, 2013.

⁶ Beberapa pertimbangan tersebut adalah elaborasi dari hasil wawancara via *handphone* dengan Dr. Basman dan Dr. Abidin Wakano, pada tanggal 3 September 2020.

Pertimbangan terhadap realitas sosiologis yang plural dan multikultural dibutuhkan. Sebab, di Maluku terdapat banyak agama. Tidak saja agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, tapi juga agama-agama lokal Maluku. Di Maluku juga terdapat demikian banyak etnik dengan budaya masing-masing yang sangat beragam, yang kehadiran dan keberadaan mereka di Maluku sudah ratusan tahun lamanya.

Selain pertimbangan sosiologis, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah bahwa Maluku pernah melewati sebuah konflik berdarah yang sangat memilukan dan menyesak dada. Konflik Maluku yang dipicu oleh akarnya yang kompleks itu telah menimbulkan kerugian dan korban yang luar biasa. Dengan kata lain, pengalaman konflik juga harus menjadi pertimbangan serius karena dampak pejoratif yang ditimbulkannya sangat signifikan, destruktif, terhadap hidup orang Maluku di semua sektor kehidupan.

Selain itu, pertimbangan pengalaman dalam melakukan pembangunan perdamaian juga menjadi pertimbangan yang harus dilihat secara lebih terbuka dan serius. Oleh karena, proses pembangunan perdamaian pada masa konflik dan sesudahnya telah melahirkan sebuah kondisi tata relasi antarumat beragama, antaretnik dan antarbudaya yang jauh lebih baik kualitasnya dari sebelumnya. Suasana keterbukaan, membangun saling percaya dan mengembangkan kesadaran untuk saling memahami dan menerima terus bertumbuh dan berkembang. Fenomena *panas pela*, baku dapa *gandong* bertumbuh dan *makan patita* digelar di berbagai tempat di Maluku adalah salah satu indikatornya. Fenomena bermunculan komunitas-komunitas kreatif yang digerakkan oleh anak-anak muda Maluku yang peduli terhadap perdamaian juga adalah indikator lain. Masih dari pengalaman

pembangunan perdamaian ini juga, Maluku kemudian menjadi laboratorium pembanguna perdamaian dan kerukunan antarumat dan antarbudaya. Bahkan, karena itu semua Maluku menjadi salah satu dari tiga daerah dengan kategori memiliki kondisi kehidupan harmoni terbaik di Indonesia.

Pertimbangan yang lain juga adalah pengembangan IAIN Ambon sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang terbuka pada masa mendatang. IAIN Ambon tidak bisa eksklusif atau harus inklusif jika ingin berkembang dan bersaiang sehat dengan berbagai Perguruan Tinggi (PT) lain di Maluku, di Indonesia Timur, di Indonesia, di Asia Tenggara, di Asia dan di dunia. Apalagi, jika IAIN Ambon kemudian bertransformasi menjadi UIN. Dengan kata lain, IAIN Ambon harus mempertimbangkan aspek menjaga keberadaan (*existency*), terus mengembangkan keunggulan (*competency*), kemampuan bersaiang secara sehat (*fair competition*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Beberapa pertimbangan di atas itulah yang kemudian berkontribusi memperkaya, memberi bobot dan mengembangkan keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dihasilkan dari hasil *Workshop Envisioning* IAIN Ambon. Pertimbangan-pertimbangan penting, mendasar dan strategi itu jugalah yang akhirnya melahirkan rumusan visi IAIN Ambon sekarang, yaitu “profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di kawasan ASEAN”.⁷

⁷ Dalam rumusan visi sebelumnya tercantum kurun waktu, yaitu 2032. Bunyi visi sebelumnya: “profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di kawasan ASEAN pada 2032”. Lihat, Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Ambon, h. 20. Akan tetapi, target waktu itu kemudian dihilangkan pada tahun 2020 untuk penyesuaian dengan kebijakan Kementerian Agama

Meski secara keseluruhan kata-kata dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar IAIN Ambon itu tidak disebutkan seluruhnya satu persatu, akan tetapi kalimat visi IAIN Ambon secara keseluruhan dan intrinsik menjelaskannya. Kata-kata seperti relijius, jujur, transparan dan inovatif dapat dipahami secara intrinsik terjelaskan dalam narasi mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi dalam bingkai multikultural. Oleh karena itu, antara keyakinan dasar, nilai-nilai dasar dan visi IAIN Ambon sama sekali tidak bertentangan atau tidak pada tempatnya jika dipertentangkan, dan sejatinya dipahami sebagai bagain-bagaian yang saling mengembangkan, memperkaya dan saling memboboti.

Jika diberi tafsir untuk menghindari kekeliruan dalam memahami visi IAIN, maka penjelasannya dapat diurai sebagai berikut:

1. Profesional tidak saja berarti ahli atau memiliki kompetensi secara kognisi (pengetahuan) semata, akan tetapi juga terintegrasi sebagai sebuah sinergi dengan kematangan afeksi (sikap), yaitu keberpihakan pada kebenaran dan kapasitas psikomotorik (keterampilan) yang dimaksudkan untuk tujuan “*rahmatan lil’alamin*”.
2. Integrasi keislaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi memberi pesan penjelas dan penegas bahwa ajaran Islam menjadi sumber nilai, inspirasi, pendorong dan sripit dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi. Integrasi juga bermakna bahwa baik antara ajaran Islam, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan teknologi

Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait perumusan visi. Itu sebab, dalam dokumen alih status IAIN Ambon menjadi UIN Imam Rijali Ambon, target atau batas waktu itu sudah tidak lagi dicantumkan. Lihat, Proposal Perubahan Ke-2 Alih Status IAIN Ambon menjadi UIN Imam Rijali Ambon, Januari 2020.

merupakan kenyataan yang tidak berdiri sendiri dan sesungguhnya merupakan sebuah sinergi. Dengan kata lain interpretasi atas ajaran Islam akan melahirkan ilmu pengetahuan, dan inilah produk kerja-kerja kebudayaan yang salah satu bentuknya adalah teknologi.

3. Nilai-nilai multikultural seperti kedamaian, penghargaan, kasih sayang, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerja sama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan misalnya adalah nilai-nilai universal yang harus menjadi basis (*core*) dari semua pengembangan ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan, dengan kata lain, diharapkan mengemban misi multikultural.

Sebagai bentuk penjabaran atas visi IAIN Ambon, maka perumusan misi dilakukan agar visi tersebut tidak tampak abstrak dan subyektif semata. Perumusan misi IAIN Ambon dibuat dengan mengacu pada visinya. Dengan kata lain, misi merupakan *breakdown* atau “pembumian” dari sebuah visi. Berikut di bawah ini adalah misi IAIN Ambon⁸, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban.
2. Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur.
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural.

⁸ Lihat, *RIP IAIN Ambon*, h. 21.

5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

Kelima misi IAIN Ambon tersebut tidak bisa dilihat sebagai misi-misi yang berdiri sendiri dan terlepas satu dari lainnya. Akan tetapi, misi-misi tersebut harus dilihat sebagai bagian-bagian yang saling terhubung, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Singkatnya, misi-misi yang lima itu terintergrasi dan sinergis. Misi penyelenggaraan pendidikan terhubung, terkait, berpengaruh dan memperkuat misi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan harus berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian juga, bahwa dampak penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan diikuti, diimbangi dan atau ditindaklanjuti dengan misi penyelenggaraan penelitian dan misi pengabdian kepada masyarakat. Dan, misi-misi itu akan berjalan lebih baik dengan dampak signifikan jika mampu dikelola secara baik dan benar, yaitu dengan melibatkan *stakeholders* strategi lain dalam bentuk kerjasama, *partnership* atau berkolaborasi. Sebab, dalam hal-hal tertentu yang tidak menjadi domainnya, IAIN Ambon juga memiliki keterbatasan dan membutuhkan kehadiran *stakeholders* lain.

Dengan memahami kelima misi IAIN Ambon tersebut di atas, maka terjawab sudah empat pertanyaan yang diajukan oleh Patrick Hull, yaitu *what we do?* ("apa yang kita lakukan?"), *how do we do it?* ("bagaimana kita melakukannya?"), *whome do we do it for?* ("untuk siapa kita melakukannya?") dan *what values are we bringing?* ("nilai apa yang kita bawa?"). Misi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat misalnya menjawab pertanyaan *what we do?* ("apa yang kita lakukan?").

Pertanyaan *how do we do it?* ("bagaimana kita melakukannya?"), *whome do we do it for?*, terjawab di dalam misis pertama sampai kelima. Pertanyaan ketiga, *whome do we do it for?* ("untuk siapa kita melakukannya?"), terjawab pada misi pertama, yaitu untuk peradaban, ini berarti umat manusia termasuk di dalamnya. Dan pertanyaan *what values are we bringing?* ("nilai apa yang kita bawa?"), terjawab pada misi keempat, yaitu nilai-nilai multikultural.

C. IAIN Ambon dan Dinamika Pasca Konflik

Konflik Maluku yang berlangsung dari 1999 sampai 2002 menemukan momentum berakhirnya pada penandatanganan kesepakatan perjanjian Maluku di Malino (Malino II)⁹, 12 Pebruari 2002. Sebelum itu berbagai inisiatif dan usaha rekonsiliasi sosial dan membangun perdamaian sudah dilakukan atas dasar swakarsa masyarakat. Sebagai contoh misalnya, kehadiran pasar *baku bae* di Mardika. Di Pasar ini warga muslim dan Kristen dapat berbaur untuk melakukan transaksi jual beli secara terbuka.¹⁰ Contoh lain adalah inisiatif imam dan jamaah masjid al-Huda di Ahuru yang melakukan kunjungan ke Gereja Petra untuk melakukan

⁹ Malino adalah nama lokasi tempat perjanjian dilaksanakan, yaitu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sementara, istilah Malino II digunakan karena sebelumnya di tempat yang sama sudah dilakukan juga sebuah perjanjian damai terkait konflik di Paso, Sulawesi Tengah, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Malino I. Perjanjian Malino II berisi 11 poin. Lihat, Tim Peneliti THC, *Demokrasi Pasca-Kondlik, Kekerasan, Dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku*, Jakarta: The Habibie Center, Cet. I, 2015, h. 29.

¹⁰ M. Azis Tunny, Jejak-Jejak Perjumpaan dalam Jacky Manuputty, Zairin Salampessy, Ihsan Ali Fauzi dan Irsyad Rafsadi (ed.), *Carita Orang Basudara Kisah-Kisah Perdamaian dari Maluku*, Ambon: LAIM-PUSAD, Cet. I, 2014, h. 116.

berbagai usaha pencegahan konflik.¹¹ Demikian juga usaha para tokoh Kristen dan muslim yang tergabung dalam tim 20 di Wayame yang menggalang kebersamaan untuk mencegah konflik agar tidak menjalar sampai ke Wayame.¹² Contoh lain lagi adalah peran tokoh adat di Maluku Tenggara dalam melakukan konsolidasi sosial untuk mencegah terjadinya konflik dan merawat kehidupan bersama dengan mengoptimasi khazanah kearifan lokal Larvul Ngabal.¹³ Atau juga, safari perdamaian Raja Tulehu ke beberapa negeri/desa Kristen di Pulau Haruku, Pulau Saparua, Pulau Nusalaut dan Pulau Seram; Oma, Haruku, Hulaliu, Paperu, Mahu, Ihamahu, Haria, Samet, Leinitu, Sila dan Kamaring misalnya.¹⁴ Dan, masih banyak lagi contoh usaha dan bentuk inisiatif atau swakarsa yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan yang sangat beragam.

Setelah lebih setahun pasca Perjanjian Malino II dengan segala dinamikanya,¹⁵ pada 21 September 2003, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik. Salah satu pertimbangan (poin a) dari Inpres adalah untuk melakukan rehabilitasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dan mengharmonisasi

¹¹ Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP, Cet. I, 2007, h. 157.

¹² Tri Ratnawati, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006, h. 7.

¹³ Baca, *ibid.*, h. 157-161.

¹⁴ Samuel Wailerunny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. II, 2011, h. 193-194.

¹⁵ Penerimaan dan penolakan terhadap Perjanjian Malino II oleh masyarakat Maluku, sekilas disinggung oleh Jacky Manuputty dan Hasbollah Tosuta dalam tulisan mereka di dalam buku Carita Orang Basudara.

kembali hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang bertikai, serta mencegah munculnya konflik baru di sejumlah kawasan tertentu. Dalam aspek keagamaan, secara khusus, peningkatan kerukunan antar dan intra beragama adalah salah satu programnya (Instruksi keempat nomor 10 (poin c)).

Kehadiran Inpres adalah momentum sangat penting bagi berbagai usaha rekonsiliasi sosial, rekonsolidasi sosial, perbaikan kehidupan sosial dan pembangunan seluruh sektor kehidupan. Momentum ini tidak saja lebih memacu, tapi juga memacu partisipasi nyata komponen-komponen masyarakat, *stakeholders* dan lembaga, baik masyarakat dan lembaga di Maluku sendiri, luar Maluku dan luar Indonesia untuk berkontribusi memabngun Maluku.¹⁶ Inisitif dan usaha-usaha itu sampai saat ini masih terus berlangsung dengan fokus yang lebih disesuaikan dengan konteks perkembangan dan perubahan yang terjadi, yaitu transformasi konflik berkelanjutan. Dengan kata lain, kerusuhan Maluku dipahami sebagai peristiwa kemanusiaan yang memberikan pembelajaran sangat penting dan menumbuhkan berikut menguatkan sebuah kesadaran baru bersesama antarwarga masyarakat Maluku dalam pengelolaan sumber daya khazanah konflik dimiliki sebagai kekuatan strategis bagi pembangunan di Maluku secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, konflik dipahami sebagaimana Lewis Coster, memiliki fungsi, yaitu: pertama, konflik dapat meningkatkan kohesi internal dari kelompok-kelompok terkait; kedua, konflik mampu menciptakan

¹⁶ Gerakan Baku Bae, Baileo, Gerakan Perempuan Peduli (GPP), Lembaga Antariman Maluku (LAIM), Dian/Interfidei Yogyakarta, The Habibie Center (THC) Jakarta, Mercy Corps, Save The Children, Medecins Sans Frontieres (MSF), Cardi, International Catholic Migration Commission (ICMC), TAF, ICCO Belanda, UNDP, JICA, Kedutaan Canada, misalnya, adalah contoh beberapa lembaga dimaksud.

keseimbangan antarkelompok; ketiga, mampu menciptakan asosiasi-asosiasi dan koalisi-koalisi baru.¹⁷ Atau, dalam nalar Franklin Dukes, konflik dalam masyarakat demokratis merupakan basis untuk terjadinya perubahan sosial (*social change*).¹⁸

Sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Islam di dalam lingkungan Kementerian Agama di Maluku, Inpres tersebut secara tidak langsung menuntut IAIN Ambon¹⁹ untuk memainkan status posisinya itu secara optimum dan maksimum, tidak bisa tidak ikut mengambil tanggung jawab, memainkan peran strategisnya, berpartisipasi aktif dan berkontribusi nyata sebagai respon terhadap Inpres tersebut. Itu berarti, IAIN Ambon dituntut untuk menggerakkan sebuah sumber daya; manusia, sarana dan prasarana, program, kebijakan dan jejaringan, yang dimiliki untuk mendorong dan melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk menciptakan kondisi kerukunan kehidupan antara dan intra umat bergama di Maluku.

Peran-peran strategis dan fungsional yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan tidak semata bertumpu pada keberadaannya sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, akan tetapi juga diperankan oleh sumber daya manusia IAIN Ambon yang menyebar dan aktif di berbagai organisasi sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Maluku, baik di level

¹⁷ Elga Sarapung, Pengantar dalam Th. Sumartana, Noegroho Agung dan Zuly Qodir (ed.), *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar-Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2002, h. xvi.

¹⁸ Syafa'atun Elmirzanah, Analisa dan Refleksi dalam Th. Sumartana, Noegroho Agung dan Zuly Qodir (ed.), *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar-Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2002, h. 110.

¹⁹ IAIN Ambon saat itu adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon.

provinsi maupun Kota Ambon. Misalnya, di Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Fatayat NU, Aisyiyah, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pencegahan Teroris (FKPT) dan lain sebagainya. Kenyataan ini menjadikan IAIN Ambon, secara internal, berkontribusi dalam kapasitasnya atau sebagai representasi dari sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam *an sich*, tapi sekaligus, secara eksternal, IAIN Ambon juga berkontribusi menggerakkan sumber daya lembaga-lembaga umat beragama dan sosial kemasyarakatan di Maluku. Kondisi ini menggambarkan bahwa kehadiran IAIN Ambon, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada dimanamana.

Komitmen IAIN Ambon untuk pembangunan permadaian dan transformasi konflik berkelanjutan di Maluku melalui berbagai usaha sejak konflik sampai sekarang terus diperkuat dan dikembangkan. Penguatan dan pengembangan cara pandang beragama yang terbuka (inklusif) sekaligus pluralis, memperkuat rasa saling percaya dan meneguhkan kesadaran untuk saling menerima perbedaan, apapun bentuk perbedaan itu, baik perbedaan ras, etnik atau suku, budaya maupun agama, terus dilakukan. Usaha-usaha tersebut tidak saja dalam bentuk inisiatif dalam bentuk perencanaan program maupun kebijakan, akan tetapi juga dalam bentuk kerjasama, *partnership* atau kolaboratif dengan berbagai mitra strategis, dalam dan luar negeri.

Penting dicatat, bahwa secara kontekstual komitmen IAIN Ambon itu dapat disebut sebagai respon terhadap peristiwa kemanusiaan, yaitu konflik Maluku, dimana IAIN Ambon menjadi bagian integral di dalamnya. Dalam konteks geografis administratif maupun identitas etnik berbudaya dan beragama sivitas akademika IAIN Ambon tidak bisa

dipisahkan dari realitas sosiologis dan hitoris Maluku yang plural dan multikultural. Akan tetapi, lebih dari sekedar itu, secara substansial, cara pandang beragama yang bertumbuh dan berkembang di IAIN Ambon adalah cara pandang beragama yang, seperti disebutkan di atas, terbuka (inklusif) dan pluralis.²⁰ Cara pandang inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi bentuk visi IAIN Ambon.

Beberapa program dilakukan dan kebijakan diambil oleh IAIN Ambon berikut ini adalah contoh nyata atau perwujudan dari komitmen dimaksud.

1. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih terbuka, memperkuat saling kepercayaan dan saling paham tentang ajaran agama berbeda, IAIN Ambon mengundang telah pendeta Dr. Lies Marantika dan pendeta Jacky Manuputty, MA misalnya, untuk menjadi dosen tamu di Pascasarjana IAIN Ambon. Pada saat yang bersamaan dosen IAIN Ambon, seperti Dr. Abidin Wakano, juga diminta untuk menjadi dosen di Universssitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon. Selain itu, IAIN Ambon juga mengundang dosen-deson dari Universitas Pattimura, UKIM Ambon dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon diundang ke IAIN Ambon sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang digelar di IAIN Ambon dengan beragam tema untuk pengembangan dan penguatan cara pandang sekaligus kesadaran beragama dan berbudaya yang menerima perbedaan, inklusif sekaligus pluralis. Selain itu, IAIN Ambon, UKIM Ambon dan IAKN juga

²⁰ Menjadi terbuka (inklusif) tidak lantas berarti seseorang dapat menerima perbedaan. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi inklusif sejatinya juga menjadi pluralis. Sehingga, ia bisa dengan menerima perbedaan dengan penuh ketulusan. *To be religious is to be inter-religious.*

terlibat dalam menggagas Teologi Orang Basudara (TOP).²¹

2. IAIN Ambon juga menjadi bagian dari sebuah konsorsium internasional, yaitu Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim and Christian Relations. Pada tahun 2016 IAIN Ambon menjadi tuan rumah penyelenggaraan salah satu kegiatan konsorsium ini bertema *The Conference of (Inter)Religious Education for Tolerance*. Ambon, 24-26 August 2016. Salah satu luaran dari kegiatan ini adalah IAIN Ambon dan UKIM Ambon mengikat diri dalam ikatan suatu *pela*, yang dinamakan *pela pendidikan*.
3. Di level dosen dan mahasiswa, kuliah bersama antara mahasiswa IAIN Ambon dengan mahasiswa UKIM Ambon juga dilakukan. Kegiatan kuliah bersama diselenggarakan secara bergiliran di kedua kampus. Kegiatan kuliah bersama dimaksudkan untuk membuka ruang perjumpaan wacana *an sich*, akan tetapi lebih dari itu adalah proses mengalami, bertemu dan berbicara secara terbuka dengan orang yang berbeda agama dan cara pandang beragamanya. Kegiatan semacam ini sangat penting dan dibutuhkan dalam konteks kehidupan masyarakat Maluku yang segregatif, baik wilayah maupun mindset (beragama dan berbudaya).²²
4. Praktek Kerja Lapangan (PKL) masiswa IAIN Ambon juga sejak tahun 2014-2019 ditempatkan di kantor Sinode GPM

²¹ Hasbollah Toisuta, Membangun Kesadaran Hidup Bersama, dalam Rachma Fitriati, Budhi Gunawan, Soni A. Nulhaqim dan Maulana Irfan, *Merawat Perdamaian 20 Tahun Konflik Maluku*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2019, h. 198.

²² Untuk memahami konteks persoalan segregasi di Maluku, baca, Tim Peneliti THC, *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik di Ambon* (2014) dan Subair, Syamsul Amal dan Moh. Yamin Rumra, *Segregasi Pemukiman Solusi atau Ancaman?* (2008).

dan di jema'at.²³ Pilihan tempat ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengamati dan berinteraksi secara langsung atau mengalami kehidupan bersama secara intens dengan orang dengan keyakinan berbeda. Dari pengamatan dan pengalaman itu, mahasiswa diharapkan memiliki cara pandang yang lebih terbuka dan lebih obyektif dalam melihat persoalan relasi antarumat beragama. Lebih dari itu, hasil pengamatan dan pengalaman itu akan menjadi modal sangat bernilai bagi para mahasiswa untuk tidak lagi merasa berjarak ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dari mereka.

5. Membentuk *Ambon Reconciliation and Mediation Center* (ARMC) IAIN Ambon. Sejak didirikan dengan SK Rektor IAIN pada tahun 2010, ARMC telah melakukan banyak sekali kegiatan, baik yang sifatnya inisiatif maupun kolaboratif dengan berbagai lembaga; Perguruan Tinggi (PT) dan NGO/*Funding* (dalam dan luar negeri). Beberapa mitra PT antara lain adalah PPIM dan CSRC UIN Jakarta, PUSAD Paramadina, PRIK UI, CSCR UGM, UMM Malang dan UNIKA Semarang. Mitra NGO/*funding* antara lain Kedutaan Besar Kanada, The Asia Foundation (TAF), UNDP dan Living Values Foundation. Tema kegiatan ARMC secara keseluruhan terkait dengan isu pembangunan perdamaian dan transformasi konflik berkelanjutan. Misalnya, bina damai, *living values* (menghidupkan nilai),

²³ Wawancara dengan Dr. Abdul Manaf Tubaka, Sekretaris Program Studi (Prodi) Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Ambon. Lihat, Abidin Wakano, Memaknai Dialog AnratAgama, dalam Rachma Fitriati, Budhi Gunawan, Soni A. Nulhaqim dan Maulana Irfan, *Merawat Perdamaian 20 Tahun Konflik Maluku*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2019, h. 41.

deradikalisasi dan terorisme misalnya. Bentuk kegiatan yang dilakukan beragam, mulai dari workshop, seminar, dialog, penulisan naskah khutbah damai hingga berkemah.

Semua program dan kebijakan tersebut di atas jelas tidak cukup menggambarkan seluruh usaha yang telah dilakukan oleh IAIN Ambon dan sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan perdamaian dan transformasi konflik berkelanjutan. Namun demikian, program dan kebijakan yang dipaparkan itu sudah cukup memberikan penjelasan bahwa IAIN Ambon memiliki komitmen sangat kuat untuk kerja-kerja pembangunan perdamaian dan transformasi konflik berkelanjutan di Maluku.

Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) The Habibie Center (THC) mencatat, bahwa sepanjang kurun waktu empat tahun kerusuhan Maluku (1999-2002) mengakibatkan 2.793 orang meninggal, 5.045 orang cedera dan 13.843 bangunan rusak.²⁴ Meski angka-angka belum secara pasti menunjukkan jumlah sebenarnya. Akan tetapi dari angka-angka itu saja agaknya cukup untuk membenarkan pandang bahwa konflik Maluku terkategori dahsyat. “Peristiwa demi peristiwa konflik disertai kekerasan yang hebat meletus dimana-mana, di hampir seluruh kepulauan.... Boleh dikata, konflik itu telah menyebabkan semua orang di Maluku menjadi korban.”²⁵

Apa yang dapat dipotert dari kedahsyatan konflik Maluku yang ditunjukkan dengan angka-angka SNPK THC tersebut adalah bahwa potensi konflik yang tidak terkelola dengan baik dan benar hanya akan menghadirkan petaka

²⁴ Op. Cit., Tim Peneliti THC, *Demokrasi Pasca-Kondlik....*, h. 29.

²⁵ Lambang Tijono, *Keluar dari Kemelut Maluku Refleksi Pengalaman Praktif Bekerja untuk Perdamaian Maluku*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2001, h. v.

sekaligus nestapa bagi manusia dan kemanusiaan. Realitas sosiologis masyarakat Maluku yang plural (ras, etnik dan agama) dan multikultura (ragam budaya berbasis etnik dan agama), dalam konteks ini, adalah potensi itu. Dan karenanya, keberadaannya tidak bisa tidak atau harus mampu dikelola secara baik dan benar, agar tidak menjadi petaka tapi justru sebaliknya membawa manfaat bagi hidup dan kehidupan warga Maluku. Pada poin ini IAIN Ambon akan terus diuji komitmennya.

BAB III RADIKALISME DI KAMPUS IAIN AMBON

A. Memahami Radikalisme

Kajian tentang radikalisme di Indonesia merupakan sebuah obyek kajian yang baru muncul sekitar tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan kemunculan gejala keagamaan berupa kecenderungan orang-orang Islam untuk mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Nurcholish Madjid melihat, ada kaitan antara gejala atau kecenderungan beragama tersebut dengan revolusi Iran pada 1979, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya skisme atau perpecahan dalam tubuh umat Islam, tak terkecuali di Indonesia.²⁷ Hanya saja, oleh karena kekuasaan Orde baru yang demikian *powerful* sehingga gerakan dengan gejala keagamaan dan kecenderungan dimaksud tidak mendapatkan ruang yang proporsional untuk bertumbuh dan berkembang. Sebaliknya, mereka kemudian memilih bergerak di bawah tanah (*under ground movement*) dan baru muncul ke permukaan pasca kejatuhan orde baru atau di era reformasi.

Sebelum memeriksa lebih jauh pengertian radikalisme, agaknya sangat penting untuk melihat kembali ke belakang, yaitu pada masa-masa awal sejarah menjelang deklarasi kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia, dimana telah terjadi perdebatan yang demikian tajam antara dua kubu, yaitu

²⁶ Afdhal, Awani Irewati, Dhururudin Washad, Dudin Zaenuddin, Dwi Purwoko, Endang Turmudi, Muhamad Hisyam dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, Cet. I, 2005, h. 109.

²⁷ Nurcholish Madjid, *Skisme dalam Islam Tinjauan Singkat Secara Kritis-Historis Proses Dini Perpecahan Sosial-Keagamaan Islam dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, Cet. I, 1994, h. 668.

kubu Islam dan kubu nasionalis-sekuler tentang dasar negara. Kubu Islam menginginkan Islam dijadikan sebagai dasar negara, sementara kubu nasionalis-sekuler menghendaki Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Dinamika perdebatan dan tarikan-tarikan kepentingan yang sangat dinamis tampak jelas. Setidaknya itu dapat dilihat pada pilihan kompromi politik atas Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, akan tetapi kemudian dianulir dan dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945 atas masukan dari Hatta yang mempertimbangkan potensi keterpecahan bangsa karena realitas sosiologisnya yang memiliki keragaman keyakinan agama.²⁸

Meski ketegangan produktif itu tampak meruncing, akan tetapi istilah radikalisme tidak mengemuka di sana. Kubu yang menginginkan Islam menjadi dasar (ideologi) negara tidak disebut sebagai radikal. Istilah yang digunakan adalah kubu Islam dan kubu nasionalis-sekuler. Istilah ini juga tidak disematkan pada gerakan yang menginginkan berdirinya negara Islam, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia disingkat DI/TII²⁹ (1949-1963), misalnya. Bahkan, hingga dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian memakan korban organisasi Pemuda Islam Indonesia (PII), dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Suparjo Rustam, karena menolak asas tunggal,

²⁸ Baca, Ahmad Syafifi Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2017, h. 137-150. Baca juga, Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Cet. I, 1999, h. 46-49.

²⁹ Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta:Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institut dan Maarif Institut, Cet. I, 2009, h. 17.

Pansasila,³⁰ istilah radikalisme juga belum digunakan. Belakangan, istilah radikalisme baru digunakan dan dialamatkan kepada Hizbut Tahrir Indonesi (HTI),³¹ yang dicabut badan hukunya menyusul dikeluarkannya Perpu. No. 2 Tahun 2017 karena penolakkannya terhadap Pancasila dan keinginan mendirikan negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Uraian di atas menunjukkan bahwa radikalisme, memang, merupakan sebuah istilah yang baru digunakan dalam dua dasawarsa belakangan. Itu sebab, istilah radikalisme harus dibedah dengan baik dan benar agar diperoleh pemahaman yang persisi. Apalagi, jika kata radikalisme dikaitkan dengan cara pandang, sikap dan tindakan atau ekspresi beragama, maka persoalannya akan menjadi tidak mudah. Meski tidak mudah, merumuskan pengertian radikalisme dibutuhkan untuk memastikannya secara teoritis.

Di dalam Ensiklopedi Pencegahan Terorisme, radikalisme dijelaskan berakar dari kata radikal. Dalam bahasa Latin “*Radix, Radicis*” berarti akar, sumber, atau asal mula. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Radikal diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik

³⁰ Imam Mahdi, *Pembubaran Ormas “Radikal? Dalam Perspektif Perundang-undangan (Kajian Khusus Perpu No. 2 Tahun 2017)*, Nuansa, Vol. X, No. 2, 2017, h. 135.

³¹ HTI masuk ke Indonesia antara tahun 1982-1983. Kehadiran HTI di Indonesia terkait dengan diundangnya salah satu tokoh HTI Abdurrahman al-Baghdadi oleh Mama Abdurrahman Nuh, pengelola Pesantren al-Ghazali, Jawa Barat. Diklaim bahwa jumlah anggota HTI sekarang sekitar 10.000 orang. Lihat, Syamsul Arifin, *Utopia Negara Khilafah Ideologi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir* (Malang: Literasi Nusantara, Cet. I, 2020), h. 58.

dengan cara kekerasan atau drastis.³² Dari penjelasan dan pengertian ini jelas tampak bahwa kata radikal adalah sesuatu yang netral sifatnya. Akan tetapi, sebagai sebuah paham atau aliran ia cenderung menggunakan cara-cara kekerasan atau drastis untuk tujuan perubahan dan pembaharuan sosial. Jadi, radikal pada awalnya adalah kosa kata yang digunakan dalam wacana sosial, bukan wacana agama.

Namun demikian, dalam perkembangannya kata radikalisme kemudian digunakan dalam wacana agama. Untuk itu, dipandang penting untuk melihat bagaimana penggunaan kata radikalisme dalam wacana sosial, sebelum akhirnya digunakan dalam wacana agama. Dengan kata lain, pengertian radikalisme dalam perspektif sosial, akan dijadikan sebagai parameter, dalam batas-batas tertentu, untuk merumuskan radikalisme beragama.

Dalam tulisannya tentang radikalisme, Horace M. Kallen, seperti dikutip Bahtiar dan Hendro, merumuskan bahwa radikalisme sosial memiliki tiga kecenderungan. Pertama, radikalisme sebagai respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan baik pada tataran asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai. Kedua, radikalisme berusaha mengganti tatanan tersebut dengan tatanan yang lain. Ketiga, radikalisme memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.³³

³² Tim Penulis, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, Jakarta: BNPT, Cet. I, 2016, h. 54.

³³ Bahtiar Effendy dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM, 1998, h. xvii-xviii.

Hampir senada dengan Horace, Theodorson dan Theodorson, sebagaimana dikutip Nur Khoiri,³⁴ mengemukakan dua pemaknaan sosiologis radikalisme yaitu: pendekatan dan ideologi. Pertama, sebagai pendekatan non-kompromis terhadap permasalahan sosial dan politik akibat ketidakpuasan yang ekstrim terhadap *status quo*, sehingga menuntut adanya perubahan secepat mungkin. Dalam hal ini, baik kelompok ekstrim kanan atau ekstrim kiri terkategori sebagai radikal. Kedua, sebagai ideologi non-kompromis yang fokus pada inovasi, perubahan dan kemajuan, sehingga tampak berbeda dari nilai-nilai sebelumnya.

Sementara, menurut Thomas Olesen dalam karyanya *Social Movement Theory and Islamic Radical Activism*, melihat bahwa dalam level organisasi, kelompok radikal dapat dilihat dari tiga pola. Pertama, cara menyampaikan dan membingkai gagasan kepada masyarakat (*framing*). Kedua, melakukan mobilisasi sumber gerakan (*mobilizing*). Ketiga, memiliki dan menggunakan taktik dan strategi (*making decision*).³⁵

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat dimengerti bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan ideologis terorganisir yang menawarkan dan memperjuangkan sebuah tatanan sosial tertentu, baru dan berbeda secara ekstrim sebagai bentuk penolakan atau perlawanan terhadap *status quo*. Dari pengertian ini, maka selanjutnya dapat dilihat bagaimana

³⁴ Nur Khoiri, *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Semarang: Southeast Asian Publishing, Cet. I, 2019, h. 7.

³⁵ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), *Dari Radikalisme menuju Terorisme Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Cet. I, 2012, h. 16.

konteks radikalisme dalam kehidupan beragama, dalam hal ini agama Islam. Menurut Haedar Natsir:

Radikalisme pada awalnya bukan sesuatu yang berbahaya. Radikal itu “*to radic*”, yakni kembali ke akar, sesuatu yang dipandang mendasar sebagaimana fungsi akar bagi sebuah pohon. Dalam beragama, orang yang kembali pada “*radic*” atau “akar” ingin segala sesuatu berpijak pada akar keyakinan, yaitu prinsip-prinsip mendasar yang menjadi pedoman bagi setiap orang beriman atau beragama. Dalam Islam, kembali pada tauhid sebagai dasar keyakinan utama.

Namun, karena orang berpaham atau beragama yang serba kembali “ke akar”, biasanya kemudian menjadi kaku, tidak mau kompromi, dan mengabsolutkan atau memutlakkan pandangan keyakinannya. Lebih-lebih tatkala sikap yang dogmatik seperti itu didasari oleh pandangan yang terbatas, sempit, dan parsial atau tidak menyeluruh mengenai sesuatu yang dipandang mendasar itu.³⁶

Rumusan Haedar di atas memperlihatkan bahwa kata radikalisme dalam wacana agama Islam secara etimologi memiliki kesamaan makna, yaitu “*to radic*” atau kembali ke akar, dengan kata radikalisme dalam wacana sosial. Hanya saja radikalisme dalam wacana agama Islam memberikan penekanan pada dua hal. Pertama, bahwa “akar” yang dimaksudkan adalah “akar tunggal”, yaitu tauhid. Kedua,

³⁶ Haedar Natsir, Pengantar: Moderasi sebagai Jalan Ketiga, dalam Muhammad Abdullah Darraz, *Jihad, Khilafah dan Terorisme*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2017, h. 26.

bahwa kembali ke akar tidak lantas berarti merepresentasikan sebuah cara pandang Islam yang terbuka, moderat dan kompromis, akan tetapi juga memperlihatkan sebuah cara pandang dogmatis, ekspresi beragama yang kaku, tidak kompromis dan memutlakkan keyakinan. Dengan kata lain, menganggap diri atau kelompok sendiri benar dan selamat, sementara orang lain yang berbeda salah dan tidak selamat (*truth claim and claim of salvation*). Menganggap diri atau kelompok sendiri beriman dan masuk surga, sedangkan orang dan kelompok lain kafir dan masuk neraka.

Bersisian dengan pandangan Haedar tentang radikalisme Islam itu, Syaiful melihat bahwa memang dalam praktiknya, ada tiga ekspresi radikalisme Islam yang kesemuanya terkait dengan atau menunjukkan warna salafi. Pertama tekstualisme dalam memahami *al-Quran*. Kedua, menekankan pada pemurnian agama dari budaya lokal. Dan ketiga, memiliki keyakinan yang kuat bahwa sistem politik Islam pada masa Nabi sebagai sebuah model ideal bagi kekuasaan Islam.³⁷ Ketiganya saling terkait atau sebangun. Memahami *al-Quran* secara tekstual tok sangat berpotensi melahirkan pemahaman yang dogmatis, kaku dan memutlakkan diri. Ini berarti tidak ada ruang bagi interpretasi berbeda, baik terhadap teks maupun konteks, sehingga ruang tafsir berbasis budaya, baik budaya Islam terlebih budaya lokal, dalam ekspresi beragama. Dan, pada saat yang bersamaan, prototipe kekuasaan Islam ideal adalah yang pernah hadir pada masa-masa awal Islam.

Oleh sebab itu, radikal Islam tidak pada tempatnya jika hanya dilihat dan dipahami sebagai sebuah cara pandang

³⁷ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Percetakan PT Gramedia, Cet. I, 2018, h. 178.

dan ekspresi beragama dalam perspektif gerakan dakwah, akan tetapi radikalisme Islam juga tidak bisa tidak dilihat dalam perspektif kekuasaan. Fenomena *Islamic State of Irak adn Suriah* (ISIS), dalam konteks ini, merupakan sebuah kasus yang kontemporer dan representatif menjelaskan sebuah model gerakan radikal oleh sekelompok orang yang mengklaim diri bersikap dan bertindak atas nama Islam. ISIS tidak hanya memaksakan cara pandanginya terhadap Islam kepada orang lain, tapi ISIS juga adalah sebuah gerakan politik untuk menjatuhkan dan merebut kekuasaan.

Dalam kontek itu, maka Ismail dan Bonar memandang, bahwa gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah gerakan aktifitas kolektif, rasional dan penuh pertimbangan dalam menyusun gerakan dengan tujuan untuk merubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat.³⁸ Bangunan struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai struktur sosial berbangsa dan bernegara. Dan tatanan nilai di masyarakat dapat dimaknai sebagai tatanan nilai berbangsa dan bernegara.

Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, cara pandang yang memaksakan sebuah tatanan dan nilai yang kontra produktif dengan realitas sosiologis bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat ironis. Disamping, secara sosio historis Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, dimana di dalamnya menyebar demikian banyak kesatuan sosial, suku bangsa, kesultanan, keraton dan kerajaan dengan struktur sosial, tatanan adat, nilai-nilai budaya dan otoritas sendiri-sendiri dan berbeda, tapi kemudian melebur menjadi negara bangsa Indonesia.

³⁸ *Op. Cit.*, Ismail dan Bonar, h. 15.

Itu sebab cara pandang atau ekspresi beragama ala Islam radikal tidak kontekstual, tidak memiliki ruang dan tidak layak ditumbuhkan dan dikembangkan di Indonesia karena dua alasan. Pertama, secara ideologis, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) adalah Pancasila. Sebagai dasar negara atau ideologi negara bangsa Indonesia, Pancasila adalah *common platform* yang dirumuskan berbasis pada realitas kebangsaan Indonesia secara apresiatif. Kedua, bangsa Indonesia beragama Islam memiliki cara pandang atau ekspresi beragama tersendiri yang kontekstual dengan realitas sosiologis (plural; multikultural) dan geografis (tropis; archipelago) sendiri, yang sangat berbeda dengan realitas sosiologi dan geografis wilayah Arab, tempat dimana ajaran Islam diturunkan.

Itu berarti, semua gerakan yang mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi lain secara otomatis dapat disebut sebagai pemikiran, sikap dan tindakan radikal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan jika gerakan itu dilakukan atas nama Islam, maka pemikiran, sikap dan tindakan itu dapat dibenarkan sebagai radikal Islam. Sedangkan dalam konteks cara pandang dan ekspresi beragama, klaim merasa diri dan kelompok sendiri beriman, paling benar dan selamat (masuk surga) dan orang dan kelompok lain kafir, salah dan tidak selamat (masuk neraka), kemudian cara diperjuangkan dengan cara-cara destruktif, melakukan tindakan kekerasan dan membunuh, atau bertentangan dengan pesan Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, maka cara pandang atau ekspresi bergama tersebut dapat sebut sebagai pemikiran, sikap, dan tindakan atau gerakan Islam radikal.

Radikalisme, dengan demikian, harus dicegah. Dan, ruang pendidikan, sejak dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT), terutama PT Islam,

baik swasta dan terutama negeri, diharapkan dapat menjadi benteng-benteng kokoh penghalang radikalisme untuk bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Sudah barang tentu, *political will*, program, perencanaan dan kebijakan strategis pemerintah sangat dibutuhkan untuk tujuan itu, yaitu menciptakan ruang pendidikan yang memungkinkan cara pandang dan ekspresi beragama ala Indonesia bertumbuh dan berkembang subur secara berkelanjutan.

B. Fenomena Radikalisme di Kampus

Pada pertengahan Mei 2019, SETARA Institut mempublikasi sebuah Ringkasan Eksekutif tentang Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan mahasiswa: Memetakan Ancaman atas Negara Pancasila di Perguruan Tinggi. Salah satu paragraf dari Ringkasan Eksekutif itu adalah sebagai berikut:

Kekhawatiran adanya radikalisme dalam dunia pendidikan termasuk universitas bukanlah hal yang berlebihan. Banyak laporan maupun hasil penelitian yang telah memaparkan betapa ada gejala serius masifnya radikalisasi di perguruan tinggi terutama yang menyasar mahasiswa. Pada tahun 2018, Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) merinci ada tujuh perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme. Pada tahun yang sama, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut ada 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi yang terpapar paham radikal. Hasil survei *Alvara Research Center* (2017) juga mengindikasikan hal serupa bahwa di kalangan mahasiswa ada kecenderungan pemahaman dan sikap yang intoleran dan radikal, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator pertanyaan yakni persentase mahasiswa yang tidak mendukung

pemimpin nonmuslim cukup besar 29,5%; mahasiswa yang setuju dengan negara Islam sebesar 23,5%; dan persentase mahasiswa setuju dengan khilafah 17,8%. Beberapa tahun sebelumnya pada tahun 2016, LIPI menyebutkan bahwa gerakan radikal telah menyasar kampus-kampus dalam rangka radikalisasi hingga rekrutmen kader dengan memanfaatkan diskusi-diskusi dan organisasi mahasiswa di kampus.³⁹

Dari kutipan panjang di atas, tampak jelas bahwa survei-survei yang dilakukan antara tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa radikalisme telah menjalar di kampus-kampus di Indonesia. Hasil temuan tiga tahun berturut-turut itu juga menjelaskan bahwa proses radikalisme dan kaderisasinya telah berlangsung jauh sebelum penelitian atau kajian itu dilakukan. Kasus sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang menjadi otak rencana serangan bom di Serpong pada tahun 2011 dan kesaksian beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bahwa mereka telah direkrut dan dibaiai kepada jaringan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun yang sama, mengindikasikan bahwa radikalisme sudah lama berkembang di kampus.⁴⁰

Bahkan, jika dianalisis lebih jauh, fenomena radikalisme di kampus bukan sebuah realitas yang dengan serta merta muncul. Akan tetapi, fenomena ini tidak bisa tidak dilihat sebagai kelanjutan dari proses sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'arif Institute pada 2011 di 50 buah

³⁹ <https://setara-institute.org/wacana-dan-gerakan-keagamaan-di-kalangan-mahasiswa-2/>

⁴⁰ Azyumardi Azra, *Relevansi Islam Washatiyah dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. I, 2020, h. 105.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Pandeglan, Cianjur, Yogyakarta dan Solo memeperlihatkan maraknya kelompok islamis; bercorak ekstrim dan menolak Pancasila, masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dilakukan terhadap 100 pelajar di wilayah Jakarta pada 2012, juga menunjukkan hasil yang tampaknya memperkuat hasil penelitian Ma'arif Institute sebelumnya. Hasilnya memperlihatkan tingginya dukungan pelajar tersebut persekusi dan kekerasan terhadap minorotas, dan mereka terhadap terorisme.⁴¹ Jadi, ada keterkaitan yang berkelanjutan antara cara pandang dan ekspresi beragama di SMAN dan kampus. Sarlito menjelaskan:

Mengingat jaringan Islam yang tergolong garis keras (*hardlaine*) menyebar di berbagai SMA di kota-kota Indonesia, maka sangat logis kalau pada gilirannya mereka juga masuk ke ranah perguruan tinggi. Bahkan, menurut beberapa sumber, alumni yang sudah duduk sebagai mahasiswa selalu aktif berkunjung ke almamaternya untuk membina adik-adiknya yang masih di SMU. Ketika adik-adiknya masuk ke perguruan tinggi, para senior inilah yang membantu beradaptasi di kampus sambil memperluas jaringan.⁴²

Meski demikian, keterkaitan atau hubungan antara cara pandang dan ekspresi beragama di SMAN dan kampus, bukan menjadi satu-satu faktor yang menyebabkan radikalisme bisa bertumbuh, berkembang dan menguatnya di kampus-kampus.

⁴¹ Noorhaidi Hasan, *Literatur Keislaman Generasi Milenial Trnasmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, Cet. II, 2018, h. 3-4.

⁴² Sarlito Wirawan Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, Cet. I, 2012, h. 121-122.

Faktor berpengaruh lain yang harus diperhatikan juga adalah lingkungan kampus berikut dinamika yang terjadi mengitarinya. Faktor-faktor dimaksud antara lain adalah pertama, lingkungan kampus yang menjamin dan melindungi terbukanya ruang untuk kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.⁴³ Kebebasan akademik memberi ruang proporsional kepada sivitas skademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan mimbar akademik memberi ruang bagi otoritas dan wibawa ilmiah secara terbuka dan bertanggung jawab kepada ilmu pengetahuan. Dan, otonomi keilmuan memberikan ruang yang terbuka dan otonomi sivitas akademika untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis kebenaran ilmiah sebagai budaya akademik. Artinya, ruang terbuka dalam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi ilmu dapat dijustifikasi memberi ruang bagi bertumbuh dan berkembangnya berbagai paham atau aliran, termasuk radikalisme. Persoalannya kemudian adalah wacana dan gerakan radikalisme akhirnya tidak bisa tidak dituntut untuk bertumbuh dan berkembang seturut kaidah-kaidah yang dibenarkan secara akademik atau sesuai dengan fatsun ilmu pengetahuan.

Kedua, faktor kurikulum pembelajaran agama Islam. Kurikulum sangat penting dan menentukan bagi pengembangan sebuah cara pandang dan penguatan kesadaran beragama. Jika kurikulum pembelajaran agama Islam bersifat dan berorientasi pada pembentukan cara pandang dan

⁴³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pnedidikan Tinggi, pasal 7.

kesadaran beragama yang inklusif, maka mahasiswa akan memiliki cara pandang dan ekspresi beragama yang juga inklusif. Demikian pula sebaliknya. Kemunculan fenomena radikalisme di kampus-kampus, dapat diduga dimungkinkan karena kurikulum pembelajaran agamanya bermasalah. Padahal, ruang untuk merumuskan dan mengembangkan kurikulum pembelajaran agama Islam sangat dimungkinkan untuk diwujudkan karena adanya Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia (ADPISI), yang secara struktural menyebar dari pusat hingga ke 20 provinsi di seluruh Indonesia.⁴⁴

Ketiga, faktor dinamika eksternal kampus yang memicu mahasiswa melakukan respon kritis terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, mahasiswa mengklaim diri sebagai sebuah kekuatan atau agen perubahan sosial. Dengan kata lain, mahasiswa selalu memosisikan diri sebagai bahagian dari dan akan selalu bersama masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik dalam urusan politik, ekonomi, hukum, sosial, agama dan lain sebagainya. Bahkan dalam kasus tertentu, mahasiswa mempertanyakan persoalan keadilan sosial dalam berdemokrasi, sistem pemerintahan yang korup, kealpaan negara dalam penegakkan hukum dan lain sebagainya. Dan bahkan, bagi mereka yang berafiliasi dengan radikalisme kemudian menawarkan sisitem khilafah sebagai jalan keluar. Karena mereka mengklaim bahwa demokrasi yang berasal barat tidak mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Keempat, faktor perkembangan teknologi informatika; internet dan media sosial. Faktor ini menyebabkan, di satu sisi,

⁴⁴ *Op. Cit.*, Noorhaidi Hasan, h. 39.

orang dengan mudah, cepat dan masif dapat memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengkomunikasikan kepentingannya. Dan, di sisi lain, juga faktor ini menyebabkan siapa saja dapat mengakses apa saja dengan sangat mudah dan cepat, sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Tak terkecuali, informasi-informasi atau berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu dan persoalan keagamaan. Seorang penceramah atau ulama, dalam konteks ini, sangat dimudahkan untuk menyampaikan pesan-pesan agamanya kepada jama'ah dan umat secara cepat dan masif lewat kanal media sosial seperti *facebook*, *youtube*, *watsApp*, *instragram* dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, jama'ah atau umat dengan mudah dapat mengakses kanal media sosial penceramah atau ulama untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya. Kelompok-kelompok radikal juga memanfaatkan kanal-kanal media sosial untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran dan propagandanya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang terpapar ajaran radikalisme karena mengakses kanal-kanal media sosial yang dibuat oleh kelompok-kelompok radikal. Endi mengingatkan, dalam konteks teroris, internet juga telah menjadi "*online university of terrorisme*" yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjadi teroris secara otodidak.⁴⁵

Keempat faktor di atas adalah faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melakukan berbagai usaha strategis sebagai jawaban atas berbagai kelemahan dan kekurangan yang membuka ruang bebas bagi bertumbuh, berkembang dan

⁴⁵ Endi Aulia Garadian, *Terorisme dan Dunia Virtual*, dalam Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf (ed.), *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Jakarta: PPIM UIN Jakarta, Cet. I, 2016, h. 139.

menguatnya radikalisme di kampus-kampus. Jika itu tidak dilakukan, maka lambat laun tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga struktural di kampus akan dikuasai dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kampanye dan propaganda radikalisme.

Beberapa studi tentang Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di beberapa daerah menunjukkan bahwa tidak sedikit LDK yang memiliki afiliasi terhadap organisasi mahasiswa, paham keagamaan dan bahkan partai politik tertentu.⁴⁶ Lebih jauh, afiliasi ini bekerja secara berjejing. Penceramah-penceramah yang didatangkan untuk mengisi materi khutbah, kajian dan pelatihan misalnya, semuanya berasal dari jejaringan yang dibangun. Itu sebab, LDK tampak cenderung eksklusif. Tidak saja sebagai sebuah organisasi, tapi juga dalam cara pandang dan ekspresi beragamanya.

Kasus yang paling akhir terkait menjalarnya radikalisme di kampus adalah tertangkapnya dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Abdul Basit, karena menyimpan dan menyiapkan 29 buah bom rakitan (molotov) untuk diledakkan pada saat unjukrasa Aksi 212 di Jakarta. Kasus tertangkapnya Abdul Basit, boleh jadi, hanyalah sebuah fenomena gunung es, jika melihat angka-angka yang dipaparkan oleh SETARA Institute dalam Ringkasan Eksekutif di atas. Oleh sebab itu,

⁴⁶ Kehadiran LDK sekitar tahun 1980-an di kampus-kampus seperti Salman ITB, Jamaah Salahudin UGM dan Salam UI misalnya, akibat pengaruh gerakan *Ihwanul Muslimin* di Mesir. Pada Munas Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), 29 Maret 1998 di Malang lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Lihat, Yupinوالي Fherastma, Titi Fitrianita dan Arief Budi Nugroho, *Kontestasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di Lembaga Dakwah Kampus Universitas Brawijaya* (Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya), h. 76. KAMMI secara politik afiliasi politiknya ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

kewaspadaan terhadap radikalisme di kampus harus lebih dikembangkan secara berkelanjutan.

Ada pandangan bahwa paham radikalisme lebih mudah diterima dan dikembangkan oleh mahasiswa atau dosen yang memiliki latar belakang pendidikan atau disiplin ilmu pengetahuan teknik. Asumsinya adalah mereka yang menggumuli dunia teknik cenderung menerima dan memahami ajaran agama secara hitam putih. Semua persolan agama dilihat dengan menggunakan “kacamata” serba pasti. Oleh karena itu, cara pandang dan ekspresi beragama mereka juga cenderung sangat dogmatik, rigid dan eksklusif.

Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Diego Gambetta dan Steffen Hertog. Mereka mengumpulkan data dari bermacam gerakan radikal Islam dan ratusan aktivis dari 30 negara di Timur Tengah dan Afrika, yang umumnya mereka lahir antara 1950-an dan 1970-an. Salah satu hasil penelitiannya adalah ternyata gerakan radikal lebih menggoda bagi mereka yang memiliki pendidikan universitas. Penelitian mereka juga menemukan fakta bahwa 60% dari para teroris di Barat memiliki latar belakang ilmu teknik (*engineering*). Kemudian, sebanyak 8 orang dari 25 teroris yang melakukan serangan 11 September 2001 juga berlatar belakang teknik. Secara keseluruhan, 44,9% dari mereka yang terlibat dalam radikalisme memiliki ijazah teknik.⁴⁷

Temuan Deigo dan Steffen yang dipaparkan dalam *Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education* (2016) itu, secara tidak langsung menjadi *warning* penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terutama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

⁴⁷ Agus Laksana, *Awas, Radikalisme Masuk Kampus!*, BASIS, Nomor 7-8, Tahun Ke-66, 2017, h. 6-7.

Negeri (PTKIN), baik UIN maupun IAIN untuk mengembangkan paradigma ilmu pengetahuan yang mampu menjembatani gap antarilmu pengetahuan yang berbeda rumpun. Hanya dengan jalan ini titik sinegri antara agama dan ilmu pengetahuan bisa dibangun. Beberapa PTKIN sudah memiliki paradigma ilmu pengetahuan untuk kepentingan itu. Hanya saja, mempertanyakan sejauh mana paradigma itu mampu meredam gerakan radikalisme adalah sebuah pertanyaan yang harus terus bisa dijawab dari waktu ke waktu.

C. Radikalisme di IAIN Ambon

Pemulihan konflik Maluku (1999-2002) diakui sebagai salah satu konflik yang proses pemulihannya terbilang cepat. Hal itu dapat terjadi, setidaknya karena dua faktor utama, yaitu partisipasi dan kontribusi nyata *stakeholders* dan kuatnya kesadaran masyarakat Maluku untuk keluar dari kemelut konflik. Namun demikian, kenyataan itu tidak serta merta menjelaskan penyelesaian persoalan konflik berikut dampak ikutan yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, konflik Maluku juga menyisahkan persoalan-persoalan yang belum dan harus diselesaikan. Jika tidak, maka persoalan-persoalan tersebut dapat bertransformasi menjadi bara api atau bom waktu yang kapan saja dapat memebakar atau meledak.

Seperti diketahui bahwa pasca Malino II, pembubaran dan penarikan laskar jihad kembali ke Jawa (2002), tidak saja menyisahkan ajaran-ajarannya yang ditanamkan lewat berbagai pengajian yang dilakukan secara intens melalaui di lebih 200 Taman Pengajian Al-Quran (TPQ) di berbagai wilayah di Maluku. Ada juga dari mereka yang kemudian memilih tidak balik dan menetap di Maluku dan melanjutkan perjuangannya mengembangkan dakwah dengan membangun komunitas dan lembaga-lembaga usaha,

pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kompleks Muhajirin, Yayasan *Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Radio Suara Tauhid, Pesantren *al-Mansuroh*, Pesantren *Tadrib al-Du'a* dan Pesantren *al-Amin* misalnya, adalah bukti yang bisa dirujuk. Beberapa dosen di IAIN Ambon bahkan menyekolahkan anaknya di Pesantren al-Mansuroh, karena alasan pesantren ini dapat membuat anak mengusaian bacaan-bacaan ayat, hadits dan do'a-doa sehari-sehari secara cepat.⁴⁸ Kompleks, yayasan, radio suara tauhid dan pesantren-pesantren tersebut terpusat di Kota Ambon, berjarak sekitar 2-3 kilo meter dari kampus IAIN Ambon.

Selin itu, konflik juga menyisahkan persoalan segregasi sosial, baik dalam makna wilayah maupun *mindset* beragama dan berbudaya. Segregasi wilayah sejauh ini sudah diterima sebagai realitas baru masyarakat Maluku secara sosiologi. Oleh sebab itu, tidak terlalu menjadi persoalan yang serius. Persoalan yang sangat serius justru muncul dalam segregasi *mindset*, yaitu *mindset* berbudaya dan beragama. Dimana, ruang-ruang pertemuan yang tadinya terbuka, orang Islam dan orang Kristen bisa hidup bersebelahan rumah, menjalani dan menikmati hidup bersama, saling membantu, saling tolong dan perhatian satu sama lain, kini menjadi eksklusif. Orang Islam lebih memilih tinggal di daerah yang mayoritas Islam, demikian pula halnya orang Kristen. Segregasi ini mengakibatkan baik orang Islam maupun orang Kristen tidak akan lagi memiliki pengalaman hidup untuk menerima keberagaman beragama dan berbudaya. Mereka hanya hidup dalam lingkungan eksklusif, yang mayoritas warganya Ismal atau Kristen. Ketiadaan penalaman hidup bersama dalam

⁴⁸ Zet. A. Sandia, *Data Base Salafi: Aktor Institusi dan Jaringan di Ambon*, 2017.

perbedaan itu akan menjadi kian parah jika narasi-narasi konflik yang diwariskan secara regeneratif cenderung bersifat *prejudice*, *stereotype* dan *stigma* belaka terhadap mereka yang berbeda.

Segregasi *mindet* berbudaya dan beragama memang menjadi serius persoalan yang dihadapi di Maluku. Berbagai kegiatan dilakukan oleh banyak lembaga, baik pemerintah maupun LSM/NGO, yang bertujuan untuk membuka ruang pertemuan dan menghadrikan pengalaman bersosialisasi antarras, antaretnik, antaragama dan antarbudaya. Hanya saja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkonsentrasi di Kota Ambon, atau tidak menyebar di kota-kota selainnya, dan hanya baru dapat diikuti oleh sebagai kecil orang. Oleh karena itu, segregasi masih menjadi persoalan yang sangat serius, karena anak-anak muda Maluku yang berasal dari daerah-daerah yang segregatif, baik secara wilayah maupun *mindset* akan membawa narasi-narasi yang diwariskan di wilayah masing-masing.

Warisan dua persoalan dampak konflik itu, sedikit banyak, akan sangat berkontribusi terhadap proses pembentukan dan perkembangan cara pandang dan ekspresi beragama. Secara lebih detail, hubungan dan pengaruh dampak konflik terhadap cara pandang dan ekspresi beragama memang masih butuh sebuah kajian tersendiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih terang dan jelas. Akan tetapi secara umum dapat diterima bahwa hubungan dan pengaruh itu ada dan terjadi.

Tidak mudah sebenarnya untuk membuat justifikasi atau klaim radikalisme terhadap sebuah kelompok, gerakan atau organisasi. Apalagi, klaim itu dilakukan dengan dalih atau dalil perbedaan cara pandang dan ekspresi beragama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menysasar pada kelompok,

gerakan atau organisasi yang sudah dinyatakan terkategori radikal oleh pemerintah, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Secara historis, Duriana menulis, bahwa HTI masuk ke Maluku pada tahun 2012, dibawah oleh seorang mahasiswa yang kembali ke Ambon setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara yaitu Milah Tomsio. Dengan misi dakwah, organisasi ini menyebar ke berbagai tempat; mesjid, kampus, perkantoran, perusahaan dan kompleks perumahan, hingga ke Masohi (Maluku Tengah), Kairatu (Seram Bagian Barat) dan Tual (Maluku Tenggara). HTI merekrut tokoh-tokoh tertentu dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan resmi HTI yang melibatkan pihak eksternal seperti seminar, kongres dan lain-lain di Maluku. Selain itu, HTI juga melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan khusus, *majlis ta'lim*, *silaturrahim* dari rumah ke rumah dan lain sebagainya.⁴⁹ Namun demikian, belum ada informasi yang pasti tentang kapan persisnya HTI hadir di IAIN Ambon. NO, salah satu anggota HTI yang wawancarai juga tidak mengetahui tentang kapan waktu HTI mulai bercikol di kampus IAIN Ambon.⁵⁰

HR menceritakan, bahwa sejak tahun 2017 dia sering melihat beberapa mahasiswa yang kerap duduk berkumpul dan melakukan kajian di bawah pohon dan juga di dalam mesjid, yang kemudian belakangan diketahuinya bahwa mereka adalah mahasiswa yang berafiliasi ke HTI. Menurut HR, narasumber-narasumber kajian tidak berasal dari IAIN Ambon, akan tetapi

⁴⁹ Duriana, *Radikalisme Agama Pasca Konflik di Maluku*, LP2M IAIN Ambon, 2013, h. 180.

⁵⁰ Wawancara dengan NO, di menjid kampus, IAIN Ambon.

dari luar. Karena, dia tidak mengenal sama sekali narasumber-narasumber tersebut.⁵¹

WF mengisahkan, dia menjadi mahasiswa IAIN Ambon pada 2017. Dalam sebuah kesempatan dia diajak untuk mengikuti sebuah acara diskusi menjelang pergantian tahun. Kegiatan itu dilaksanakan oleh kelompok HTI di mesjid kampus IAIN Ambon. Di dalam diskusi itu, WF menyebutkan bahwa mereka diajarkan untuk tidak boleh merayakan peristiwa pergantian tahun atau tahun baru. Juga, tidak boleh merayakan hari valentine. Oleh karena kedua perayaan itu tidak diajarkan dalam Islam dan berasal dari barat.⁵²

Senada dengan HR dan WF, kesaksian yang relatif sama juga diungkapkan oleh AMT, bahwa HTI sudah lama ada di IAIN Ambon. Sampai 2019, AMT masih melihat mahasiswa-mahasiswa HTI melakukan kajian di bawah beberapa pohon yang tumbuh rindang di kampus. Namun, belakang fenomena itu sudah tidak tampak akibat covid-19. Lebih jauh, AMT juga menjelaskan bahwa, dirinya punya pengalaman pernah ditawarkan oleh salah seorang dosen LB IAIN Ambon yang menawarkan buku tentang HTI. Hanya saja, setelah berdiskusi panjang lebar soal HTI, dosen tersebut tidak pernah dijumpainya lagi dan sudah tidak lagi menjadi dosen LB di IAIN Ambon sekarang.⁵³

AW membenarkan pengamatan, kesaksian dan penjelasan HR, WF dan AMT. AW mengatakan bahwa fenomena kajian-kajian mahasiswa HTI di bawa pohon dan

⁵¹ Wawancara dengan HR, mantan aktifis mahasiswa (intra dan ekstra kampus) dari IAIN Ambon. Sekarang menjadi ASN di IAIN Ambon.

⁵² Wawancara dengan WF, mahasiswa dan aktif di LINTAS, media mahasiswa di IAIN Ambon.

⁵³ Wawancara dengan AMT, mantan aktifis mahasiswa (intra dan ekstra kampus) dari IAIN Ambon. Skarang menjadi dosen, ASN, di IAIN Ambon.

mesjid kampus sudah lama tampak di kampus IAIN Ambon. Dimulai sekitar tahun 2017. Sampai awal 2020 fenomena kajian itu masih tampak, tapi sekarang terhenti. AW menduga, berhentinya fenomena kajian itu kemungkinan disebabkan oleh covid-19. Tapi, AW menjelaskan, bahwa sebagai sebuah gerakan politik, kajian-kajian itu pasti tidak berhenti. Sebab, kajian-kajian di bawah pohon itu tidak bisa tidak dilihat sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan, sebuah kampanye dan mungkin juga suatu propaganda HTI. Kajian-kajian HTI bisa saja dilakukan di tempat-tempat lain di sekitar atau di luar lingkungan kampus.⁵⁴

Jika diperhatikan konteks waktu yang menjadi poin penting dari amatan, kesaksian dan penjelasan HR, WF, AMT dan AW, agaknya hal itu terkait dengan dinamika isu terkait HTI yang menguat dan mengencang pada tahun itu, 2017. Disamping, bahwa sebelum tahun itu dan juga sesudahnya, sederetan penelitian tentang kekerasan, radikalisme dan terorisme telah dilakukan berikut hasilnya dipublikasikan secara terbuka oleh banyak lembaga.⁵⁵ Dan, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan AW, dosen, ASN, di IAIN Ambon.

⁵⁵ Lembaga-lembaga yang melakukan pemantauan secara intens terhadap persoalan kebasan beragama, kekerasan, radikalisme dan terorisme tersebut anatar lain adalah CSCR UGM, The Wahis Institute, SETARA Institute dan The Habibie Center (THC).

⁵⁶ Sebelum Perpu No. 2 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi landasan yuridis untuk mengatur organisasi kemasyarakatan. Salah satu pertimbangannya adalah karena UU tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persisnya, ada kekosongan hukum untuk menerapkan sanksi yang efektif.

yang menjadi pijakan dilakukannya pencabutan badan hukum HTI oleh pemerintah.

Menurut MA, meski secara formal organisasi HTI sudah tidak bergerak dan melakukan aktifitas atas nama HTI, akan tetapi aktifitas mereka masih terus berjalan. Mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya beraktifitas di bawah bendera HTI, sekarang beraktifitas dengan menggunakan nama kelompok baru, yaitu Gema Pembebasan. MA menjelaskan, mahasiswa-mahasiswa Gema Pembebasan berpendapat bahwa meskipun HTI tidak lagi diakui oleh negara, mereka berharap kampus bisa tetap memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan diri.⁵⁷

Model keterlibatan mahasiswa IAIN Ambon dalam HTI secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mereka yang terlibat dalam kegiatan dan menjadi anggota HTI. Dan mereka yang hanya mengikuti kegiatan diskusi HTI tapi tidak terlibat dalam gerakan dakwahnya. NO misalnya, mengaku bahwa ia tidak hanya terlibat dalam kajian-kajian HTI saja, tapi juga menjadi anggotanya.⁵⁸ Sementara, WF dan BT misalnya, mengatakan hanya terlibat dalam diskusi dan tidak terlibat dalam gerakan dakwahnya. Kasus NO, WF dan BT adalah contoh yang representatif menggambarkan model keterlibatan mahasiswa IAIN dalam HTI dan kegiatannya.

Keterlibatan mahasiswa IAIN Ambon kegiatan HTI dan kemudian memilih menjadi anggota HTI atau sekedar mengikuti diskusi-diskusi yang digelar oleh HTI adalah karena pendekatan-pendekatan rekrutmen yang digunakan dan kemampuan menciptakan ruang-ruang yang intens untuk

⁵⁷ Wawancara dengan MA, mantan Ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN Ambon.

⁵⁸ Wawancara dengan NO, di Mesjid Kampus, IAIN Ambon.

pengembangan diri bagi mahasiswa. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan hubungan keluarga, etnik, senioritas dan ekonomi. Sementara, ruang-ruang pengembangan diri dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan-kegiatan pengajian atau diskusi secara terencana dan reguler.

Pendekatan keluarga. Pendekatan ini dipandang sangat efektif karena orang yang paling dekat dan dipercaya adalah keluarga. Bagi calon mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang baru akan memaski dan menjalani kuliah pada masa-masa awal di IAIN Ambon, hubungan kekeluargaan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kondisi kehidupan kampus dan memberi tuntunan untuk mampu menjalani kehidupan di kampus secara baik untuk menjadi sarjana dan mewujudkan cita-cita mereka. Sementara, pendekatan etnik, dapat disebut sebagai pendekatan alternatif, yaitu jika hubungan keluarga tidak ada, maka hubungan etnik menjadi pendekatan yang bisa digunakan. Cara bekerjanya sama dengan pendekatan keluarga. Mulai dari menyambut kedatangan mahasiswa baru, menjelaskan kondisi kampus hingga memberi arahan untuk mencapai sarjana atau mewujudkan cita-cita.

Adapun pendekatan senioritas digunakan tidak saja dalam konteks etnik, tapi juga dalam kapasitas sebagai orang yang terlebih dulu menjadi mahasiswa IAIN Ambon. Biasanya, pendekatan ini sangat fungsional bekerja pada lingkungan paling kecil, yaitu program studi atau prodi. Itulah mengapa, sehingga mahasiswa yang terlibat dan kemudian menjadi anggota atau sekedar mengikuti diskusi HTI umumnya berasal dari prodi tertentu. Namun demikian, penting dijelaskan bahwa senioritas dimaksud bukan dalam pengertian senior dalam kepemimpinan struktur lembaga organisasi mahasiswa di prodi. Akan tetapi, senior dalam pengertian menjadi anggota

HTI terlebih dulu. Persisnya, senior HTI di prodi tertentu. NO mengisahya:

“Pertamakali bergabung di kegiatan/kajian yang dilakukan oleh HTI adalah melalui ajakan kaka tingkat (senior) yang satu jurusan di pada awal semester satu tahun 2016. Waktu itu saya hanya ikut berpartisipasi.”⁵⁹

Selain itu, pendekatan pertemanan juga dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk memikat dan menggaet orang yang paling terdekat dalam konteks sosialisasi dan interaksi dalam kehidupan keseharian. UAJT⁶⁰ misalnya mengungkapkan bahwa beberapa orang yang terpapar oleh ajaran HTI adalah teman dekatnya. Diataranya adalah NO, AS, AHU, L, J, MRU dan M. Pemisalan lain diceritakan oleh NAH⁶¹ sebagai berikut:

“Saya melihat dan mengamati ada sekitar empat teman yang tergabung dalam jaringan HTI. Salah satu nama yang masih ingat adalah S. Saya tidak tahu dia itu masuk kuliah angkatan berapa. Saya pernah diajak untuk gabung, tapi saya menolak.”

Pendekatan lainnya adalah ekonomi. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga silaturahmi sekaligus memperkuat keanggotaan sesama anggota HTI. Bantuan ekonomi dalam bentuk sembako diberikan kepada anggota-anggota HTI atau orang yang menjadi target HTI, yang secara ekonomis

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Wawancara dengan UAJT, mahasiswa IAIN Ambon.

⁶¹ Wawancara dengan NAH, mahasiswa IAIN Ambon.

membutuhkan. Meski nilainya kecil seperti beberapa bungkus indomie misalnya, namun bantuan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dalam situasi ketika dibutuhkan. Perhatian seperti inilah yang kemudian bertransformasi menjadi spirit ikatan solidaritas dan soliditas kebersamaan antara sesama anggota HTI.

Membuka ruang pengembangan diri lewat diskusi-diskusi rutin juga menjadi cara HTI untuk melakukan rekrutmen anggota. NO menjelaskan:

“Pertama-tama dengan cara mengajak teman dan ade-ade yang terdekat untuk mengikuti kajian pekanan secara terbuka, dan siapapun bebas untuk ikut serta. Kegiatan pekanan ini sering dilaksanakn pada hari jum’at sore sahabis shalat ashar.”⁶²

TB menceritakan pengalamannya sehingga bisa ikut dalam kegiatan HTI sebagai berikut:

“Saya masuk kulaih 2018 dan mulai tergabung dalam kelompok diskusi HTI pada bulan desember tahun 2018. Diskusi yang pertamkali saya ikut yakni soal pembahasan kenegaraan: membandingkan ideologi pancasila dengan sistem Khilafah. Diskusi intens dilakukan empat kali seminggu. Senin, belajar bahasa inggris; Rabu, (pendalman teori hukum; Jumat malam, yasinan dan belajar mengaji; Minggu malam, Diskusi pengetahuan umum.”⁶³

⁶² Wawancara dengan NO, mahasiswa IAIN Ambon.

⁶³ Wawancara dengan BT, mahasiswa IAIN Ambon.

Intensitas pertemuan lewat ruang-ruang pengembangan diri seperti kajian tampak merupakan strategi yang sangat baik untuk melakukan rekrutmen. Kondisi dinamika kebangsaan yang dipenuhi dengan pertarungan wacana dan kepentingan politik dengan memanfaatkan isu agama, telah menarik kelompok-kelompok umat beragama ikut bermain politik praktis, dan pada saat yang bersamaan ruang-ruang diskusi tampak lengang di kampus, maka membuka ruang-ruang diskusi dan pengembangan diri menjadi tidak saja kontekstual, tapi juga efektif digunakan sebagai jalan bagi HTI untuk melakukan rekrutmen anggota.

Terkait pola rekrutmen HTI melalui pembukaan ruang-ruang pengembangan diri dan wawasan itu, HR memberi analisa sebagai berikut:

“Mahasiswa sangat membutuhkan wadah untuk mengembang wawasan atau mengembangkan melalui forum-forum diskusi misalnya. Wadah seperti ini sulit dijumpai di IAIN Ambon. Baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus seperti HMI, PMII, IMM dan lain sebagainya tidak menyediakan wadah yang dibutuhkan untuk berdiskusi. Maka, tak salahlah jika mahasiswa akhirnya memilih untuk mengikuti diskusi-diskusi yang ditawarkan oleh HTI. Dan bahkan kemudian menjadi anggotanya. Sejatinya, oraganisasi intra dan ekstra kampus harus menjawab persoalan ini dengan membuka ruang-ruang diskusi juga sebagai *counter narative* terhadap wacana, konsep dan ide-ide yang dibawa oleh HTI ke kampus ini.

Seperti halnya tema-tema yang diusung oleh HTI di tempat lain, tema-tema kajian atau diskusi yang dipercekapkan oleh mahasiswa-mahasiswa HTI di IAIN Ambon juga tidak

berbeda. Mulai dari tema-tema yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan seperti larangan merayakan tahun baru dan *valentive day* karena tidak diajarkan agama Islam dan berasal dari barat; menjadi pribadi yang berislam secara *kaffah*; hingga tema-tema politik seperti penolakan terhadap demorasi, ideologi pancasila dan khilafah. Keseluruhan tema-tema ini adalah tema-tema yang sangat serius dan berpotensi mengancam tatanan kehidupan sosial berbudaya, beragama, berbangsa dan bernegara di Indonesia, jika yang terjadi adalah pembiaran atau kealpaan narasi banding atau *counter narrative* yang mempertanyakan secara koseptual tema-tema yang diusung oleh HTI itu.

Pola rekrutmen yang berlangsung di kampus IAIN Ambon adalah strategi dakwah dan gerakan sosial yang dikembangkan oleh HT secara umum. Syamsul⁶⁴ mengidentifikasi, ada tiga tahap yang dipakai HTI dalam strateginya. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (*al-tatsqif*). Strategi dijalankan dengan membuka ruang-ruang kajian dalam bentuk *halaqah-halaqah*, dengan tema-tema kajian akidah, dakwah, hukum Islam (ideologi) dan pengenalan HTI. Stategi ini dijalankan dengan pendekatan pertemana, teman kuliah, teman kost atau keluarga. Kedua, tahap berikteraksi dengan umat (*marhalah tafaul ma'a al-ummah*). Tahap ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pesan-pesan Islam menurut HTI kepada umat Islam. Model kegiatannya anatar lain pembinaan intensif (*tatsqif murakkas*), yaitu sebuah upaya untuk menciptakan kader yang mampu mewujudkan

⁶⁴ Syamsul Arifin, *Utopia Negara Khilafah Ideologi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir* (Malang: Literasi Nusantara, Cet. I, 2020), h 124-171. Lihat juga, Sudartono Abdul Hakim, Azhar Saleh dan Ahmah Al-Fajri, *Gerakan Trans-Nasional Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Fethullah Gulen* (Jakarta: LP UIN Jakarta, 2012), h. 38.

cita-cita HTI; pembinaan kolektif (*tatsqif jama'i*), yaitu ditujukan untuk kepentingan sosialisasi HTI lewat seminar atau dialog, misalnya; dan pergolakan pemikiran (*al-Shira' al-Afkar*), yaitu kegiatan menentang kepercayaan, ideologi, aturan, pemikiran kufur, menentang segala bentuk aqidah yang merusak dan persepsi yang keliru dan menyesatkan tentang Islam. Dan ketiga, pengambilalihan kekuasaan (*istilam al-hukm*). Inilah tahapan menegakkan kembali khilafah, dimana Islam dapat diterapkan secara total, *kaffah*.

Jika ditelaah semua penjelasan di atas, jelas tampak bahwa HTI di IAIN Ambon masih menyebar di lingkungan mahasiswa dan belum sampai ke dosen-dosen di IAIN Ambon. AW dan HR sependapat bahwa di IAIN Ambon ada beberapa dosen yang dalam pemikiran, berpendapat dan ceramah-ceramahnya sangat keras, tapi itu personal dan bukan bagian dari HTI.⁶⁵ Beberapa dosen IAIN Ambon juga menyekolahkan anaknya di Pesantren *al-Mansuroh* yang dikelola oleh komunitas Salafi melalui Yayasan *Abu Bakar Ash-Shiddiq* atau di sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pnedidikan As-Salam, di Ambon,⁶⁶ akan tetapi ini tidak cukup dijadikan alasan pembenar bahwa dosen-dosen tersebut sudah terpapar radikalisme.

Sebagai salah satu bentuk pemikiran salafi, HTI dalam perspektifnya, sebagaimana umumnya pemikiran kelompok salafi umumnya, memang bertujuan mengajak umat Islam untuk kembali ke landasan beragama, yaitu *al-Quran* dan *Sunnah Rasul*, yang secara kontekstual bentuk penerapannya sesuai dengan yang diajarkan pada masa nabi Muhammad Saw

⁶⁵ Wawancara dengan AW via telpon dan HR di ruang kerjanya di kampus, IAIN Ambon.

⁶⁶ *Op. Cit.*, Zainal Arifin Sandia.

dan masa-masa yang dekat dengan masa hidup dan kehidupan nabi Muhammad Saw. Untuk hal ini, sebenarnya tidak saja menjadi tujuan kalompok-kelompok salafi saja, tapi semua kelompok di dalam umat Islam memiliki tujuan yang sama. Persoalannya kemudian adalah pemahaman atas kata *salaf*.

Kata *salaf* secara harfiah berarti yang lampau. Dalam perkembangan semantiknya kemudian mengandung konotasi masa lampau yang berkewenangan atau otoritatif. Tidak berhenti sampai di situ, persoalannya terus berkembang dan mempertanyakan status kesalafan (otoritas atau kewenangan). Apakah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali misalnya. Terkait ini dikenal empat pendapat. Pertama, kaum Sunni berpendapat bahwa masa keempat khalifat itu adalah benar-benar otoritatif, berwenang, dan benar-benar *salaf*. Kedua, bani Umayyah atau kaum Umawiy, pada masa-masa awalnya hanya mengakui masa Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai masa *salaf*. Tanpa Ali. Ketiga, kaum Khawarij hanya mengakui masa Abu Bakar dan Umar sebagai masa *salaf*. Dan keempat, kaum Rifada dari kalangan Syi'ah, menolak keabsahan masa-masa *salaf* sebelum Ali dan hanya mengakui masa Ali sebagai masa *salaf*.⁶⁷

Dari situ, maka klaim HTI sebagai salah satu kelompok *salaf* juga adalah sebuah tafsir atas kata *salaf* itu. Dengan kata lain, Cara pandang dan ekspresi beragama HTI adalah hasil dari sebuah penafsiran. Dan itu berarti adalah produk pemikiran atau interpretasi atas al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, itu juga berarti adalah produk sejarah.⁶⁸

⁶⁷ Op. Cit., Nurcholish Majid, *Islam Doktrin....*, h. 375-377.

⁶⁸ Baca, Moh. Saleh, *Khilafah Sebagai Produk Sejarah Bukan Produk Syariah* (Yogyakarta: Istana Publishing, Cet. I, 2017), h. 179-189.

BAB IV

RESPON TERHADAP PAHAM DAN GERAKAN RADIKALISME DI IAIN AMBON

A. Membumikan visi Multikultural

Sudah dipaparkan sebelumnya pada BAB II, bahwa Visi IAIN Ambon, yaitu “profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural di kawasan ASEAN”. Dalam tafsirnya, profesional menggambarkan sosok berkepribadian dengan kompetensi kognisi (pengetahuan), memiliki kematangan afeksi (sikap) dan mempunyai kapasitas psikomotorik (keterampilan) secara terintegrasi dan sinergis, yang dengannya Islam sebagai ajaran “*rahmatan lil’alamin*” diwujudkan. Integrasi keislaman, keilmuan, kebudayaan dan teknologi berarti bahwa interpretasi terhadap pesan-pesan ajaran Islam berikut pengembangannya adalah hasil kerja-kerja kebudayaan yang tampak dalam berbagai bentuk ilmu pengetahuan. Sementara, nilai-nilai multikultural seperti kedamaian, penghargaan, kasih sayang, toleransi, kejujuran, kerendahan hati, kerja sama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan dan persatuan misalnya adalah nilai-nilai yang menjadi inti (*core*) dari semua alasan dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam semua bidang kehidupan.

Jika ditelisik dari tafsir visi di atas, maka kata kunci visi IAIN Ambon adalah “*rahmatan lil’alamin*.” Artinya, semua aktifitas yang bersumbu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, keseluruhannya direncanakan, dilakukan dan dikembangkan

secara berkelanjutan untuk mewujudkan pesan Islam sebagai ajaran “*rahmatan lil ‘alamin*.”⁶⁹ Bahwa kehadiran ajaran Islam tidak hanya untuk kepentingan manusia saja atau untuk kelompok tertentu saja, akan tetapi untuk semesta alam.

Dalam konteks itu, maka semua pemikiran, sikap dan tindakan yang cenderung merusak atau menghancurkan hidup dan kehidupan, manusia dan kemanusiaan, keseimbangan dan keberlangsungan kualitas lingkungan hidup, jelas bertentangan dengan visi IAIN Ambon. Itu berarti semua paham, gerakan atau organisasi yang cenderung merusak atau menghancurkan hidup dan kehidupan, manusia dan kemanusiaan, keseimbangan dan keberlangsungan kualitas lingkungan hidup, sejatinya tidak memiliki ruang dan tempat untuk bertumbuh dan berkembang di IAIN Ambon.

Meski demikian, fakta memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Paham radikal seperti HTI menunjukkan bisa masuk, bertumbuh dan berkembang di IAIN Ambon. Itu berarti, ada persoalan yang memungkinkan itu terjadi. Secara internal, barangkali persoalannya ada pada pemahaman tentang visi IAIN Ambon. Artinya, seseorang yang memilih berkuliah di sebuah Perguruan Tinggi (PT) sejatinya memahami visinya. PT tempatnya kuliahnya itu akan menjadikan mahasiswa dan luarannya menjadi apa, bagaimana dan untuk apa. Jadi, persoalannya tidak sesederhana “asal kuliah”!, sehingga pilihan PT tidak jadi masalah. Jika itu terjadi, maka persoalannya ada pada mahasiswanya. Memang persoalannya tidak bisa digeneralisasi untuk kasus ini, karena lingkungan dan proses

⁶⁹ “Dan tiadalah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. *al-Anbiya*:107). Dalam, perspektif ulama sebagai pewaris nabi, maka IAIN Ambon diharapkan melahirkan ulama-ulama (ilmuan) pengemban misi ajaran *rahmatan lil ‘alamin* itu.

pada saat berkuliah juga memungkinkan seorang mahasiswa dapat memahami dengan baik dan benar tentang visi kampusnya.

Sementara secara eksternal, kemungkinan persoalannya adalah dinamika perkembangan lingkungan luar kampus yang menawarkan ruang-ruang berbeda dan memicu mahasiswa untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan yang berseberangan dengan visi kampus. Dinamika perkembangan lingkungan di luar kampus yang berlangsung demikian cepat karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat canggih, memang menyebabkan mahasiswa dapat mengakses ruang-ruang baru yang menurutnya relevan dengan dirinya dan kemudian memilih ruang-ruang itu sebagai arena baru untuk bertumbuh, berkembang dan mengekspresikan diri secara terbuka.

Problem visi memahami visi memang tidak melulu menjadi persoalan mahasiswa saja, tapi juga dosen dan tenaga kependidikan. Dengan kata lain, sivitas akademika IAIN Ambon, tidak bisa tidak, harus memahami visi institusinya secara baik dan benar, membatinkan dan melembagakannya di ruang kesadaran dan mentalitas, serta mengekspresikannya dengan penuh komitmen dan konsisten. Seturut itu, maka “membumikan” visi IAIN Ambon menjadi persoalan mendasar, sangat penting dan dibutuhkan. Terkait itu, sejauh ini, beberapa agenda strategis “membumikan” visi IAIN Ambon sudah dilakukan, antar lain adalah:

1. Merumuskan paradigma keimluan IAIN Ambon. Paradigma adalah cara melihat obyek ilmu pengetahuan atau sebuah realitas, alam semesta. Istilah yang

dipopulerkan oleh Thomas Kuhn⁷⁰ ini belakangan kemudian digunakan untuk bagaimana seseorang, komunitas atau lembaga mengidentifikasi diri berdasarkan karakteristik, karakter tertentu, yang berbeda dari yang lain, mencari jalan untuk merumuskan identitas dan mengidentifikasi diri sebagai representasi jati diri dan keyakinan yang utuh sekaligus sangat kuat terhadap visinya dalam proses berkreasi dan berinovasi di dalam lingkungannya secara berkelanjutan.⁷¹

Bahr al-'Ulum sebagai paradigma keilmuan IAIN Ambon adalah sebuah hasil pembacaan secara kritis terhadap kenyataan dan memformulasinya kedalam cara pandang: pertama, kesadaran sejarah bersama. Bahwa, dalam proses bertumbuh dan berkembang yang sarat dinamika,⁷² manusia dalam fase-fase penyebaran kemudian mengalami pengelompokan manusia dalam bentuk suku-suku dan bangsa-bangsa.⁷³ Pada fase-fase tertentu, kepada mereka dikirimkan atau dihadirkan nabi atau rasul⁷⁴ sebagai pembawa kabar gembira dan pengingat tujuan kehadiran mereka di alam (bumi).⁷⁵ Itu sebab, Kuntowijoyo menegaskan, “tampaknya, kita justru perlu terus menyadari bahwa kita mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban umat manusia.”⁷⁶ Selanjutnya, Kunto menguatkan

⁷⁰ Kuhn mempopulerkan kata paradigma melalui bukunya *The Structure of Scientific Revolution* yang diterbitkan di Chicago, 1962.

⁷¹ Baca, *Paradigma Keilmuan IAIN Ambon Bahr al-'Ulum*, 2017.

⁷² QS. *Yusun*:19.

⁷³ QS. *al-Hujurat*:10-14.

⁷⁴ Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet. L, 2004), h. 38.

⁷⁵ QS. *al-Maidah*:48; *al-Baqarah*:148.

⁷⁶ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1993. h. 290.

penegasannya bahwa “semua peradaban dan semua agama mengalami proses meminjam dan memberi dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu hampir tidak mungkin kita bersikap eksklusif. Sikap seperti itu adalah sikap yang a-historis, dan tidak realistis”.⁷⁷ Kedua, umat penengah. Dalam istilah *al-Quran ummtan washatan*.⁷⁸ Ini adalah sebuah posisi untuk menjembatani “jurang” yang menganga (*bridging the gap*), yaitu dikotomi antara dualisme kubu ekstrim; timur dan barat, spiritual dan material, tradisionalisme dan modernisme, humaniora dan eksakta, kualitatif dan kuantitatif, ilmu umum dan ilmu agama, dan seterusnya.⁷⁹ Dan ketiga, kemalukuan. Kearifan lokal di Maluku seperti *pela*, *gandong*, *wari wa*, *wal ya*, *kalwedo*, *elowue*, *badati*, *masohi*, *sasi* dan lain sebagainya,⁸⁰ harus ditranformasi ke dalam berbagai bentuk kebijakan publik di berbagai sektor pembangunan, yang kontekstual dengan relaitas sosialogis, geografis dan sumber daya alam Maluku secara berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

2. Membuat buku pengantar multikultural. Ada tiga alasan mendasar dibuatkan buku pengantar Mata Kuliah Multikultural. Pertama, visi IAIN Ambon. Kedua,

⁷⁷ *Ibid.*, Kuntowijoyo.

⁷⁸ QS. al-Baqarah 143.

⁷⁹ QS. al-Baqarah: 177.

⁸⁰ Aholiab Watloly, *Memotivasi Kaum Muda untuk Melestarikan dan Menghidupkan (Merevitalisasi) Kearifan Lokal*. Makalah dipresentasikan pada FGD Menstimulasi Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Daerah Paska Konflik Ambon dan Poso melalui Revitalisasi Kearifan Lokal, kerjasama ARMC IAIN Ambon dengan Unika Soegijapranata Semarang, tanggal 9 Juni 2015 di Ruang Senat IAIN Ambon. Baca juga, Aholiab Watloly, *Memperkuat Falsafah Hidup Orang Basudara dalam Karel Albert Ralalahu, Berlayar dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri* (Ambon: Ralalahu Institute, Cet. I, 2012), h. 241-268.

pemahaman, kesadaran dan cara pandang tentang multikultural penting di berikan kepada mahasiswa baru. Artinya, tiap mahasiswa IAIN Ambon diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan cara pandang yang baik dan benar tentang multikultural, yang menjadi visi IAIN Ambon. Ketiga, sebagai wacana yang relatif baru di IAIN Ambon, maka wacana ini dikembangkan dan diperkuat.⁸¹ Dengan kata lain, pembelajaran multikultural di IAIN Ambon adalah kebutuhan substansial dan strategis, karena terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kesadaram visi multikultural IAIN Ambon.⁸²

Buku pengantar mata kuliah multikultural adalah sebuah upaya untuk meletakkan landasan filosofis, teologis dan sosiologis dalam memahami kenyataan dan keniscayaan multikultural sebagai bagian dari hidup dan kehidupan umat manusia; keadaban dan peradabannya. Buku ini terdiri dari enam bab. Bab I tentang multikultural di dalamnya dibasas tentang pengertian multikural, sejarah multikultural, nilai-nilai multikultural dan paradigma multikultural. Bab II tentang Globalisasi dan Multikultural, membahas tentang globalisasi, *cross culture* dan multikultural dan identitas lokal dan globalisasi. Bab III tentang Indonesia dan Multikultural, di dalamnya dibahas tentang historisitas multikultural masyarakat Indonesia, mengelola keragaman: Pancasila sebagai *Common Word*, gagasan multikulturalisem dan pengelolaan keragaman di Indonesai dan dari gagasan ke gerkan. Bab IV tentang Maluku dan Multikultural, di dalamnya dikupas tentang

⁸¹ Mohdar Yanlua, Kata Pengantar dalam Abidin Wakano, dkk., *Pengantar Multikultural*, Ambon: IAIN Ambon Press, Cet. I, 2018, h. v-vi.

⁸² Hasbollah Toisuta, Sekapur Sirih, dalam Abidin Wakano, dkk., *Pengantar Multikultural*, Ambon: IAIN Ambon Press, Cet. I, 2018, h. xi.

realitas multicultural Maluku, nilai-nilai multikulturalisme Maluku dan multikultural sebaga identitas Maluku masa depan. Bab V tentang Islam, ilmu pengetahuan dan multicultural, di dalamnya diulas tentang doktrin ilmu dalam Islam, ilmu pengetahuan, integrasi ilmu pengetahuan dan interkoneksi ilmu pengetahuan. Dan, pada Bab VI di dalamnya dibahas tentang landasan multikultural dalam Islam, respon Islam terhadap Islam dan perjumpaan budaya, globalisasi dan respon Islam terhadap lokalitaas.

Dalam perkembangannya kemudian tema-tema multikultural nantinya akan menyinggung persoalan-persolan kontekporer dan lebih spesifik. Misalnya, multikultural dan kebijakan publik, multikultural dan gender, multikultural dan lingkungan hidup dan seterusnya.

3. Kurikulum. Penyelarsan kurikulum dengan visi IAIN Ambon juga dilakukan. Sejauh ini, hal itu dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, perdekatan mata kuliah, yaitu dengan memperkenalkan multikulturalisme lewat mata kuliah khusus. Untuk tujuan ini, dibentuk sebuah *team teaching* untuk mengajarkan mata kuliah pengantar multikultural, melakukan evaluasi terhadap hasilnya dan memberikan masukan untuk pengembangan pembelajaran mata kuliah multikultural. Dan kedua, pendekatan integrasi, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai dan pesan-pesan multikultural ke dalam semua mata kuliah.⁸³
4. Pembinaan dosen baru. Sumber daya dosen adalah faktor penting dalam proses “membumikan” visi IAIN Ambon. Oleh sebab itu pembinaan terhadap dosen-dosen baru harus dilakukan. Mengingat, dosen baru yang terekrut berasal

⁸³ Wawancara dengan Dr. Basman dan Dr. Abidin Wakano, vi atelepon.

dari latar belakang pendidikan yang beragam. Sejauh ini, IAIN Ambon melakukan pembinaan melalui sebuah pelatihan untuk memperkenalkan nilai-nilai multikultural visi IAIN Ambon dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dihidupkan dalam kehidupan keseharian (*living values*). Ke depan, pembinaan dosen harus dilakukan lebih serius, terencana dan reguler. Seperti *islamic studies*, misalnya. Prinsipnya, semua dosen diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal pokok dalam ajaran Islam. Ruang ini diharapkan menjadi wadah untuk membentuk rekonstruksi cara pandang Islam yang terbuka, dalam konteks IAIN Ambon berbingkai multikultural.

5. Pengenalan Budaya Akademik (PBAK). Pada momen PBAK, ruang untuk memperkenalkan visi multikulturalisme juga dilakukan. Hanya saja, sangat disadari bahwa ruang PBAK tidak cukup memadai jika pendekatan yang dipakai untuk memperkenalkan visi IAIN Ambon adalah ceramah. Barangkali, kedepan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang relatif lebih edukatif, berdaya menciptakan kesan yang lebih mendalam dan membekas dalam ingatan dalam kurun waktu yang panjang.

Kelima agenda strategis di atas hanyalah beberapa agenda besar yang rutin dilakukan. Ruang-ruang untuk usaha membunikan visi IAIN Ambon sesungguhnya masih cukup terbuka luas. Misalnya saja, mendorong kebijakan tentang persentasi penelitian dengan *concern* multikultural, membangun kerjasama untuk membangun laboratorium multikultural di desa-desa, mengoptimalkan mimbar mesjid kampus, ma'had, laboratorium komunikasi masa yang memiliki fasilitas audio visual yang cukup *up to date*. Selain itu juga, ruang-ruang pelatihan untuk rekrutmen kepemimpinan

dan kepengurusan lembaga-lembaga mahasiswa juga sangat memungkinkan untuk dilakukan usaha-uaha “membumikan” visi IAIN Ambon. Selain, tentu saja, berbagai macam program reguler yang difokuskan untuk tujuan yang sama. Dan, masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan untuk “membumikan” visi IAIN Ambon.

B. Mengembangkan Paham Islam *washatiyah*

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah,...”⁸⁴

Dan demikian Kami telah menjadikan kamu sebagai umat penengah agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.⁸⁵

Kedua ayat tersebut di atas dapat dipastikan selalu dirujuk oleh banyak pemikir, pengkaji atau penulis sebagai acuan mengkaji atau mempercakapkan wacana Islam *Washatiyah*, kerap diterjemahkan sebagai Islam inklusif, Islam moderat, Islam Nusantara, Islam *mainstream*,⁸⁶ atau Islam jalan tengah misalnya. Meski beragam istilah yang diasosiasikan dengan Islam *washatiyah*,⁸⁷ akan tetapi secara umum istilah

⁸⁴ QS. *al-Bararah*:177.

⁸⁵ QS. *al-Bararah*:143.

⁸⁶ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Cet. I, 2019, h. 131.

⁸⁷ Kata *washatan* adalah derivasi dari kata *washat*. Dalam bahasa Indonesia ada kata wasit. Ini artinya, umat Islam dituntut untuk bersikap *fair* dan adil terhadap sesama manusia. Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi*

itu dipakai untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah posisi pemahaman tentang ajaran Islam yang berada di antara dua kubu ekstrim yang saling bertolak belakang; individu dan masyarakat, timur dan barat, tradisional dan moderen, material dan spiritual, dunia dan akhirat, dan seterusnya. Dalam gambaran Dawam Rahardjo, berislam seperti mendayung di antara dua karang.⁸⁸ Atau juga, dipakai untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah cara pandang yang berbasis pada konteks. Misalnya, konteks Indonesia atau Islam washatiyah Indonesia.⁸⁹

Dari situ dapat dipahami bahwa Islam *washatiyah* adalah sebuah cara pandang terhadap ajaran Islam yang dibangun dengan menjadikan realitas konteks sebagai unsur penting dalam ekspresinya. Dengan demikian Islam washatiyah Indonesia adalah sebuah ekspresi beragama atau berislam yang kontekstual Indonesia. Pertimbangan-pertimbangan seperti realitas sosiologis yang plural dan multikultural, gergrafis (maritim, bukan kontinental) dan sejarah proses menjadi sebuah bangsa adalah fakta-fakta yang sangat berbeda dengan realitas tempat dimana Islam pertama kali diturunkan. Dalam kaitan ini, Nurcholish Madjid mengatakan, Islam itu bersifat a-historis, dalam arti berwujud ajaran-ajaran murni dan bersifat mutlak dan universal (berlaku tanpa terikat ruang dan waktu). Tetapi karena Islam adalah untuk kepentingan manusia guna memenuhi kebahagiaannya, maka mau tidak mau ia

Nurcholish Madjid *Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: 2012, h. 3542.

⁸⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. I, 2018, h. 5.

⁸⁹ Aztu Mardi Azra, *Relevansi Islam Washatiyah dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. I, 2020, h. 140.

menyejarah, yakni, menyatu dengan pengalaman hidup manusia sendiri yang menjelma dalam sejarah.⁹⁰

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan kontekstual dalam beragama tidak saja boleh dilakukan, akan tetapi dibutuhkan. Sudah barang tentu, hal-hal yang sifatnya prinsip dari ajaran Islam tetap ditegakkan dan dijalankan. Misalnya, perintah shalat lima waktu tetap wajib dilaksanakan sesuai rukunnya, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Akan tetapi pilihan menggunakan peci atau songkok dan sarung, bukanlah hal yang perlu diperdebatkan sepanjang kondisinya bersih. Demikian pula halnya dengan zikir setelah rukun shalat dikerjakan. Tidak perlu diperdebatkan, karena ia berada di wilayah budaya beragama (*bid'ah hasanah*) dan bukan bagian dari rukun shalat. Pemisalan lain, membayar zakat fitrah adalah perintah yang wajib ditunaikan oleh tiap umat Islam. Akan tetapi, soal bentuk zakatnya boleh berbeda dan boleh kontekstual. Di Maluku misalnya, pada masa lalu bentuk zakat fitrahnya sagu. Ini tidak perlu dipersoalkan karena sumber daya panganan pokok orang Maluku adalah sagu. Artinya, bentuk zakat, baik gandum atau sagu, hanyalah media menunaikan zakat, tapi yang terpenting dan utama adalah ketulusan dan keihlasan mengeluarkan zakat fitrah sebagai jalan untuk membersihkan jiwa dan harta. Ada medan perjumpaan antara agama dan kebudayaan, yang oleh Kuntowijoyo⁹¹ disebutkan sebagai interkaksi, dimana agama mempengaruhi kebudayaan

⁹⁰ Norcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Teeah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Cet. I, 1992), h. 330. Lihat, Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2012, h. 59.

⁹¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid Mencari Metode Aplikasi Nilai-nilai al-Quran pada Masa Kini*, Yogyakarta: IRCISoD, Cet. I, 2018, h. 211.

dalam pembentukannya (nilainya adalah agama dan simbolnya adalah kebudayaan).

Islam yang datang pada periode awal adalah Islam yang yang sensitif kebudayaan lokal. Oleh karena itu Islam secara bersahaja dapat diterima, berbaur, bertumbuh dan berkembang bersama kebudayaan lokal. Ada titik temu antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya Indonesia. Titik temu inilah yang membuat persoalan yang sifatnya kulit dari agama dan kebudayaan dapat didamaikan. Di level titik temu inilah, maka arsitektur mesjid-mesjid pertama di Indonesia bentuknya menyerupai arsitektur lokal, warisan hindu.⁹² Di Denpasar, Bali, mesjid al-Hikmah yang dibangun dengan arsitektur dan ukiran khas pulau Dewata. Di Palembang dan Makassar, arsitektur mesjid Cheng Ho memadukan antara budaya Islam dengan budaya Tiong Hoa. Demikian juga di Maluku, mesjid tertua, Wapaue, dibangun dengan bahan-bahan lokal (atap dan gaba-baga).

Agama memang sesuatu yang sakral, namun penafsirannya tidak sakral dan karena itu dapat dikritik, dimodifikasi, diverifikasi, dan didefenisikan kembali.⁹³ Jadi, Islam sesungguhnya membuka ruang yang sangat terbuka dan sangat akomodatif terhadap realitas sekelilingnya berikut kemungkinan perubahan dan perkembangan yang terjadi sebagai dampak ikutannya secara berkelanjutan. Bayak pesan-pesan ajaran Islam yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak

⁹² *Op.Cit.*, Kuntowijoyo, Paradigma..., h. 191.

⁹³ Haidar Bagir, Soroush: Potret Seorang Muslim “Liberal”, dalam Abdul Karim Soroush, Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdulkarim Soroush, diterjemahkan oleh Abdllah Ali dengan judul *Abdul Karim Soroush Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan Media Utama, Cet. 2002, h. xvii.

bisa tidak bersikap terbuka kenyataan-kenyataan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu kami dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”⁹⁴

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.”⁹⁵

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan atau jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.”⁹⁶

Ketiga ayat tersebut di atas dengan jelas meunjukkan bahwa keragaman dan perbedaan adalah keniscayaan kehidupan. Dalam khazanah perbendaharaan kosa kata *al-Quran* disebut sebagai *sunnah tullah*, ketentuan Tuhan. Perbedaan perempuan dan laki-laki, perbedaan suku-suku dan

⁹⁴ QS. *al-Hujurat*:13.

⁹⁵ QS. *al-Rum*:22.

⁹⁶ QS. *al-Baqarah*:48.

bangsa-bangsa, perbedaan bahasa-bahasa dan ragam warna kulit, kesemuanya adalah hukum Tuhan, yang dengannya manusia dapat saling mengenal dan berlomba untuk meraih taqwa. Ini berarti, perbedaan tidak bisa tidak diterima sebagai jalan menuju ketaqwaan. Sebaliknya, menolaknya justru berarti menutup jalan menuju ketakwaan. Itu sebab, dalam salah satu hadits disebutkan perbedaan disebut rahmat. Tentu yang dimaksud adalah menerima perbedaan berikut mengelola secara positif, produktif dan konstruktif, agar memberi dampak signifikan bagi perubahan dan kemajuan kehidupan yang beradab dan berperadaban.

Islam washatiyah adalah sebuah cara pandang, kesadaran dan ekspresi berislam yang menerima realitas khazanah keragaman sosial dan seluruh perbedaan di dalamnya secara terbuka dan apresiatif. Islam washatiyah memberi ruang yang sangat terbuka bagi bertumbuh dan berkembangnya gagasan-gagasan dan konsep-konsep baru yang inovatif agar ajaran Islam secara kontekstual selalu adaptif dan adoptif secara kritis terhadap perubahan dan perkembangan zaman (*shalihun likulli zaman wa makan*), berikut memberi solusi dan resolusi yang menjawab berbagai persoalan manusia dan kemanusiaan di berbagai sektor kehidupan berumatan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif Watloly,⁹⁷ moderasi beragama (Islam washatiya, pen.) diharapkan mampu menjawab kecenderungan yang menampilkan keangkuhan, hipokrit, arogansi religius, dan mengandung motivasi eksternal, ke dalam kesadaran kritis untuk berubah ke arah kehidupan keagamaan yang lebih baik.

⁹⁷ Aholiab Watloly, *Moderasi Beragama dalam Jagat Spiritualitas Indonesia*, dalam Tim Pelaksana Redaksi, *Mozai Moderasi Beragama dala Perspektif Kristen*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Cet. I, 2019, h. 83.

Sebagai wacana, istilah Islam washatiyah sudah menggema di IAIN Ambon sejak konflik Maluku terjadi. Istilah *ummatan washatan* dan Islam washatiyah selalu mengemuka di ruang-ruang perbincangan untuk pembangunan perdamaian dan transformasi konflik berkelanjutan. Kedua istilah tersebut dipandang mengandung pesan dan nilai yang kuat untuk meredam dan menghentikan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi dan sekaligus merespon secara kritis berbagai paham (salafi) yang kontra produktif dengan sosio kultural dan sosio religius orang Maluku, yang dibangun dengan ikatan-ikatan kearifan lokal, orang basudara; *pela*, *gandong*, *wari wa*, *wal ya*, *malahin*, *kalwedo*, *ai ni ain* dan lain sebagainya.

Konsep *ummatan washatan* dan Islam washatiyah dipandang kontekstual dengan cara pandang beragama dan berbudaya orang Maluku yang terbuka. Ide yang muncul pasca konflik seperti Islam mazhab Ambon⁹⁸ dan Kristen Maluku misalnya, adalah contoh gagasan yang menjelaskan gambaran relasi sebangun yang kuat antara ajaran agama dan kearifan lokal Maluku dalam kehidupan orang basudara. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebelum istilah diperbincangkan secara serius di ruang-ruang pembangunan perdamaian dan transformasi konflik berkelanjutan pada masa konflik dan sesudahnya, orang Maluku sudah mempraktekkan ajaran washatiyah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, Islam washatiyah harus terus secara intens digemakan dan diamplifikasi gaungnya di Maluku. IAIN Ambon dalam hal ini, dengan demikian, dituntut untuk

⁹⁸ Hasbollah Toisuta, Robohnya Baileo Kami Refleksi atas Persoalan Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas Masyarakat Maluku, Yagyakarta: Idea Press Yogyakarta, Cet. I, 2010, h. 113.

mengambil tanggung jawab proporsional dan memainkan peran aktif untuk memperkuat dan mengembangkan pemikiran Islam washatiyah di Maluku, berikut menerjemahkannya ke dalam bentuk rencana dan kebijakan strategis lembaga yang terukur, bertarget dan kontributif bagi semesta pembangunan di Maluku. Untuk tujuan itu, maka beberapa agenda yang dipandang penting untuk dilakukan oleh IAIN Ambon antara lain adalah:

1. Melakukan kajian konsep Islam washatiyah Maluku.
2. Membangun kerjasama lintas lembaga; instansi pemerintah, kampus dan pihak swasta, untuk melakukan kajian-kajian dan studi-studi yang korehensip tentang relasi agama dan budaya di Maluku.
3. Membuat *pilot project* pengembangan masyarakat berwawasan Islam washatiyah di desa binaan IAIN Ambon. *Pilot project* ini bisa dikombinasikan dengan *pilot project* pengembangan desa multikultural.
4. Membuat *policy paper* atau *policy brief* sebagai masukan kepada *stakeholders* pengambil kebijakan publik pengemabangan kehidupan beragama berwawasan Islam washatiyah.

C. Mengembangkan Kampus yang Sensitif Radikalisme

Pengalaman membuktikan bahwa radikalisme adalah paham yang berbahaya dan berpotensi mengancam, tidak saja pribadi orang yang terpapar radikalisme, akan tetapi lebih paran dari itu menganacam tatanan yang sudah mapan, *status quo*. Pelarangan organisasi radikal Islam, seperti HTI di berbagai negara⁹⁹ memberi bukti bahwa radikalisme adalah

⁹⁹ Negara-negara yang melarang dan membubarkan HTI: Yordania (1953), Mesir (1974), Suriah (1998), Uzbekistan (1999), Tajikistan (2001), Rusia

sangat berbahaya. Oleh sebab itu, maka mengantisipasi paham-paham radikal harus dilakukan lebih serius lagi sebelum paham-paham radikalisme itu lebih bertumbuh, berkembang dan menguat dan akhirnya benar-benar menjadi kekuatan yang tidak lagi berada di arena wacana, tapi lebih dari itu bertransformasi menjadi tindakan-tindakan yang melawan atau bahkan memerontak secara fisik, seperti yang dilakukan oleh terorisme.

Dari pengalaman praksis, Syaiful mengidentifikasi bahwa radikalisme Islam secara berjenjang dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu puritanisme salafi wahabi, radikalisme salafi haroki dan terorisme salafi jihadi.¹⁰⁰ Pada tingkatan bawah, radikalisme Islam didasari sikap beragama puritas, yaitu memurnikan agama dari segala bentuk praktik berbudaya. Agama diharamkan bercampur dengan kebudayaan. Radikalisme di tingkat ini bukanlah sebuah gerakan politik dan tidak menganjurkan dilakukannya tindakan terorisme. Setingkat di atas puritanisme adalah radikalisme. Di tingkat ini kecenderungannya mengalami penguatan signifikan, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perubahan secara mendasar dan menyeluruh dengan menjadikan Islam sebagai basis ideologi. Menuntut dan mendesak penggantian sistem politik moderen seperti demokrasi dan negara bangsa dengan Islam dan khilafah adalah contoh gerakan radikalisme. Dan, di tingkat puncak adalah terorisme. Di tingkat ini radikalisme Islam menggunakan cara-cara dan pendekatan bersenjata untuk

(2003), Jerman (2003), Turki (2004), Kirgistan (2004), Tajikistan (2005), Kazakhstan (2005), China (2006), Spanyol (2008), Bangladesh (2009), Malaysia (2015), Pakistan (2016), Indonesia (2017), Arab Saudi (Era Abdulaziz), Libya (Era Moamar Khadafi), Perancis (-) dan Tunisia (-).

¹⁰⁰ *Op.Cit.*, Syaiful, h. 118.

memperjuangkan ajaran-ajarannya dan cita-citanya, mendirikan negara Islam dengan sistem khilafah.



Secara psikologis, Fathali Moghaddam, mengurai tentang proses transformasi seorang menjadi teroris, seperti dijelaskan oleh Ismail dan Tigor,¹⁰¹ bahwa, ada lima tangga kondisi yang terjadi sebelum akhirnya seseorang menjadi teroris.

“Individu menginterpretasikan kondisi materialnya; di tangga pertama, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; di tangga kedua, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan. Mereka yang secara aktif mencari kesempatan untuk melancarkan serangan meningkat pada tahapan selanjutnya, yakni melakukan tindakan melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh.

¹⁰¹ Ismail Hasani dan Tigor Bonar Naipospos, h. 14.

Pada tangga ketiga, individu mengidentitikasi diri dengan mengadopsi nilai nilai moral dari kelompoknya. Perkembangan krusial, adalah pada tangga ketiga menuju pada tangga keempat, dimana setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup hidup. Individu dalam tangga kelima ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan kegiatan terorisme.”

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa radikalisme Islam adalah paham keagamaan di dalam umat Islam yang harus diwaspadai, dipantau terus perkembangannya dan dicegah sedini mungkin. IAIN Ambon harus melakukan itu secara terencana, reguler dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting dan strategis yang dapat dilakukan untuk tujuan pencegahan itu adalah menjadikan kampus memiliki sensitifitas terhadap paham-paham radikalisme.

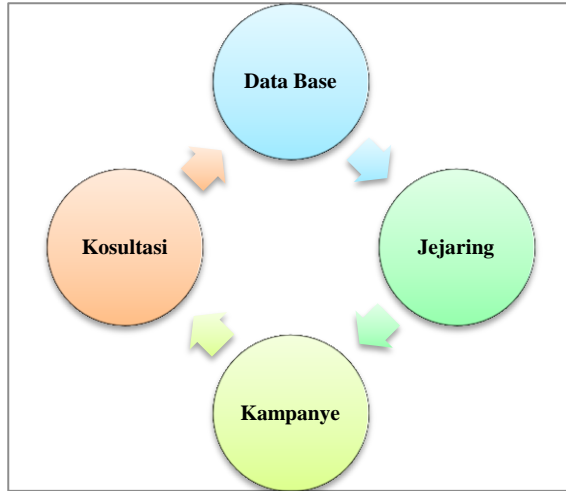
Kampus sensitif radikalisme adalah gagasan untuk menciptakan sebuah sistem atau mekanisme deteksi dini, semacam *Early Warning System* (EWS), untuk mitigasi gejala dan gerakan radikalisme di IAIN Ambon. Deteksi dini dibuthkan agar IAIN Ambon dapat memformulasi berbagai pendekatan yang dibutuhkan untuk mencegah mahasiswa agar tidak terpapar atau melakukan pendampingan terhadap mahasiswa yang sudah terpapar paham radikalisme.

Secara sederhana dan umum, deteksi dini untuk pencegahan paham radikalsime mencakup:

1. Sistem data base mahasiswa yang mamapu mereka jejak aktifitas mahasiswa sejak pertama kali mendaftarkan diri secara formal sebagai mahasiswa IAIN Ambon. Data

terpenting terkait ini adalah rekam jejak semasa bersekolah di SLTA.

2. Membangun kerjasama dengan *stakeholders* strategis dan berwenang untuk peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan penguatan strategi pencegahan paham radikalisme. Instansi kepolisian, perguruan tinggi, lembaga-lembaga sosial umat beragama, LSM dan media adalah beberapa dari instansi yang dimaksud. Asas proporsionalitas menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih atau over lap dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Salah satu hal yang paling serius dilakukan dalam kerjasama lintas stakeholders ini adalah monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara terencana, rutin dan berkelanjutan.
3. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan ruang-ruang yang memungkinkan dapat dioptimasi untuk menyebarkan informasi, kampanye dan dakwah tentang ancaman sebaran dan dampaknya terhadap kehidupan berumat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang-ruang virtual, laboratorium komunikasi masa dan media mahasiswa LINTAS misalnya, dapat dioptimalisasi untuk melakukan kerja-kerja penyebaran informasi, kampanye dan dakwah pencegahan paham radikalisme.
4. Membangun dan mengembangkan ruang konsultasi yang memadai untuk pendampingan terhadap calon atau mahasiswa-mahasiswa yang diduga dan diidentifikasi terpapar paham radikalisme agar tidak tidak terjerumus lebih ke dalam radikalisme, yaitu menjadi terorisme.



Sistem pencegahan atau deteksi dini terhadap paham radikalisme hari ini, dengan melihat kondisi perkembangan mahasiswa yang terpapar paham radikalisme, sudah menjadi kebutuhan mendesak. Sejauh ini, berbagai usaha yang dilakukan di IAIN Ambon untuk mencegah mahasiswa terpapar paham radikalisme masih cenderung dibuat dalam bentuk seminar, dialog atau workshop. Kegiatan-kegiatan seperti ini jelas penting dan perlu terus dilakukan. Akan tetapi, melakukan pemantauan dini untuk pencegahan penyebaran paham radikalisme jauh lebih penting dan dibutuhkan.

Ke arah itu, maka langkah penting dan strategis yang harus dilakukan oleh IAIN Ambon adalah membuat kebijakan dan perencanaan untuk membangun, meningkatkan dan mengembangkan sistem pencegahan, sistem deteksi dini atau EWS untuk mitigasi gejala, penyebaran dan gerakan paham radikalisme di IAIN Ambon.

BAB V

P E N U T U P

Apa yang dipaparkan dalam buku ini adalah kenyataan-kenyataan yang diramu sedemikian rupa secara naratif agar dapat dikomunikasi ke ruang publik dan pada saat yang bersamaan juga menjadi bahan yang kontributif untuk kepentingan dan kebutuhan pengambilan kebijakan strategis dalam pencegahan radikalisme di IAIN Ambon. Dalam kaitan itulah, kesimpulan berikut di bawah ini dipandang dapat menjadi gambaran besar untuk melakukan kerja-kerja pencegahan radikalisme beragama di IAIN Ambon dan PTKIN lainnya di Indonesia.

A. Kesimpulan

1. Tidak dapat dipungkiri bahwa radikalisme telah menyebar, bertumbuh dan berkembang di IAIN Ambon. Meski tidak diketahui secara pasti kapan persisnya radikalisme, dalam hal ini HTI, masuk ke IAIN Ambon, akan tetapi dari informasi yang diperoleh diperkirakan antara 2014 dan 2015. Dan memuncak pada tahun 2017, sebelum akhirnya badan hukumnya dicabut HTI menyusul diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Radikalisme di IAIN Ambon masih merupakan sebuah kelompok yang cenderung cair dan terbatas di lingkungan mahasiswa pada prodi tertentu. Merka sejauh ini, masih bergerak di luar dan belum masuk kedalam struktur kelembagaan organisasi mahasiswa. Belum ada informasi atau data yang menunjukkan keterlibatan dosen IAIN Ambon dalam gerakan atau terpapar paham radikalisme. Walau didapati beberapa dosen yang ceramah-ceramahnya terkategori keras dan menyekolahkan adaknya di pesantren salafi.

2. Paham radikalisme yang berkembang di IAIN Ambon adalah relatif sama dengan paham HTI di tempat lain. Tema-tema kajian mereka yang menyasar pada kehendak untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan Islam dan memperjuangkan khilafah menggantikan NKRI adalah dua contoh yang membenarkan adanya kesamaan paham antara HTI di IAIN Ambon dan HTI di berbagai tempat lainnya.
3. “Membumikan” visi IAIN Ambon ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilakukan. Itu berarti akatifitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara tepat mencerminkan visi multikultural. Nilai-nilai multikultural; terbuka (menerima perbedaan), jujur, tulus, rela, kerjasama, adil, bertanggungjawab, berkelanjutan dan lainnya, harus membatin dan melembaga di dalam fakultas mentalitas sivitas akademika IAIN Ambon. Lebih jauh, komitmen “membumikan” visi IAIN Ambon itu diharapkan bekerja secara sistemik dalam bentuk perencanaan program dan kebijakan yang secara targeted dapat dipantau dan diukur secara berkala, reguler dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Dibutuhkan sebuah sistem pencegahan, deteksi dini atau EWS untuk melakukan mitigasi terhadap gejala, penyebaran dan gerakan radikalisme di IAIN Ambon, yang dikelola secara terkonsentrasi oleh sebuah lembaga terikat secara struktural.
2. Dibutuhkan sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis *dashboard* untuk memantau perkembangan paham radikalisme di IAIN Ambon secara berkala, reguler dan berkelanjutan.

3. Dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengungkap informasi dan data-data lebih detail untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang gerakan radikalisme di IAIN Ambon.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Amin, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2012.
- Al Qurtubi, Sumanto, *Islam dan Kristen Dinamika Pasca Konflik dan Masa Depan Perdamaian di Ambon*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Cet. I, 2018.
- Amirrachman, Alfa (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Jakarta: ICIP, Cet. I, 2007.
- Ansori, Muhammad Hasan dkk., *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Jakarta: The Habibie Center, Cet. I, 2019.
- Arif, Syaiful, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi Menegihkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Cet. I, 2018.
- Arifin Syamsul, *Utopia Negara Khilafah Ideologi dan Gerakan Sosial Hizbut Tahrir*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Cet. I, 2020.
- Afdhal, Awani Irewati, Dhurorudin Washad, Dudin Zaenuddin, Dwi Purwoko, Endang Turmudi, Muhamad Hisyam dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, Cet. I, 2005.
- Assauri, Sofjan, *Strategic Management Edisi 2*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Global dan Jaringan Lokal Islam Nusantara Bandung* : Mizan, Cet. I, 2002.
- , *Relevansi Islam Washatiyah Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Kesalehan*, Jakarta: PT Kopmas Media Nusantara, Cet. I, 2020.

- Bellah, Robert, N., *Beyond Belief Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Bruce, Steve, *Fundamentalisme Pertautan Sikap Keberagamaan dan Modernitas*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Effendy, Bachtiar & Prasetyo, Hendro (Peny.), *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998.
- Fitria, Rahma, Gunawan, Budhi, Nulhakim, Soni A., Irfan, Maulana, *Merawat Perdamaian 20 Tahun Konflik Maluku*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Cet. I, 2019.
- Darraz, Muhammad Abdullah, *Reformulasi Ajaran Islam Jihad, Khilafah dan Terorisme*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. I, 2017.
- David, Fred R., *Strategic Management Concepts And Cases*, New Jersey: Prentice Hall, Ed. XIII, 2011.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2003.
- Djafar, Alamsyah A., *(In)Toleransi! Memahami Kebencian dan Kekerasan Atan Nama Agama*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. I, 2018.
- Duriana, *Radikalisme Agama Pasca Konflik di Maluku*, LP2M IAIN Ambon, 2013.
- Jahroni, Jajang & Makruf, Jamhari, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep, dan Model*, Jakarta: PPIM IUN Jakarta, Cet. I, 2016.
- Hasan Noorhaidi, *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, Cet. II, 2018.
- Hasani, Ismail dan Naipospos, Bonar Tigor (ed.), *Dari Radikalisme menuju Terorisme Studi Relasi dan Trnasformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa tengah*

- & *D.I. Yogyakarta*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, Cet. I, 2012.
- Hidayat, Komaruddin dan Gaus, Ahmad, *Imenjadi Indonesia 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Bandung: Penerbitan Mizan, Cet. I, 2006.
- Hull, Patrick, *Answer 4 Questions to Get a Great Mission Statement*, Forbes, 10 Januari 2013.
- Husaein, ED., *The Islamist: Why I Joined Radical Islam in Britain, What I Saw and Why I Left*, diterjemahkan oleh Rh. Widada dengan judul *Pengakuan Pejuang Khilafah*, Yogyakarta: Penerbit Gading, Cet. I, 2017.
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogta, Cet. I, 1999.
- Khoiri, Nur, *Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Semarang: Southeast Asian Publishing, Cet. I, 2019.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1993.
- , *Identitas Politik Umat Ialam*, Yogyakarta: IRCiSoD, Cet. I, 2018.
- , *Muslim Tanpa Mesjid Mencari Metode Aplikasi Nilai-nilai al-Quran pada Masa Kini*, Yogyakarta: IRCISoD, Cet. I, 2018.
- Laksana, Agus, *Awas, Radikalisme Masuk Kampus!*, BASIS, Nomor 7-8, Tahun Ke-66, 2017.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Penerbit Mizan dan Maarif Institute, Cet. I, 2017.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan*

- Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mahdi, Imam, *Pembubaran Ormas “Radikal? Dalam Perspektif Perundang-undangan (Kajian Khusus Perpu No. 2 Tahun 2017)*, Nuansa, Vol. X, No. 2, 2017.
- Manuputty, Jacky, Salampessy, Zairin, Fauzi, Ihsan Ali, Rafsadi, Irsyad (ed.), *Carita Orang Basudara Kisah-kisah Perdamaian dari Maluku*, Ambon: LAIM Maluku, Cet. I, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Bumi AKsara, Cet. XIII, 2014.
- Marpaung, Rusli & Aral, Al (ed.), *Terorisme Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, Cer. I, 2003.
- Maslow, Abraham, *The Psichology of Science*, diterjemahkan oleh Hani’ah dengan judul *Psikologi Sains Tinjauan Kritis terhadap Prikologi Ilmuwan dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Jakarta: TERAJU, Cet. I, 2004.
- Mubarak, Muhammad Sofi, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*, Jakarta: Pustaka Harakatuna, Cet. I, 2017.
- Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1945*, diterjemahkan oleh Deliar Noer dengan judul *Gerakan Moderen di Indonesia 1900-1945*, Jakarta: LP3ES, Cet. VII, 1995.
- Peneliti, Tim, *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca-Konflik di Ambon*, Jakarta: The Habibie Center (THC), Cet. I, 2014.
- , *Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (NSPK) The Habibie Center (THC)*, Jakarta: THC, Cet. I, 2015.
- Penulis, Tim, *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*, Jakarta: BNPT, Cet. I, 2016.

- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2004.
- , *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, Cet. I, 1994.
- , *Ensiklopedi Nurcholish Madjid Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Jakarta: 2012.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, Cet. I, 1993.
- Rahmat, Jalaluddin (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, Cet. III, 1994.
- Ratnawati, Tri, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2006.
- RI, Kemenag, *Mozaik Moderasi Beragama dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, Cet. I, 2019.
- Sandia, Zainal Arifin, *Data Base Salafi: Aktor Institusi dan Jaringan di Ambon*, 2017.
- Said, Anas (Ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru*, Jakarta: Desantara, Cet. I, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, Cet. I, 2012.
- SB, Agus, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Penerbit Daulat Press Jakarta, Cet. I, 2014.
- *Merintis Jalan Mencegah Terorisme (Sebuah Bunga Rampai)*, Jakarta: Semarak Lautan Warna, Cet. I, 2014.
- Sholeh, Moh, *Khilafah Sebagai Produk Sejarah, Bukan Produk Syariah*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2017.
- Soehartono, Irawan, *Metode Peneltiain Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial*

- Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IX, 2015.
- Soroush, Abdul Karim, Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdulkarim Soroush, diterjemahkan oleh Abdllah Ali dengan judul Abdul Karim Soroush Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, Bandung: Mizan Media Utama, Cet. 2002.
- Subair, Amal, Syamsul, Rumra, Moh. Yamin, *Segregasi Pemukiman Berdasarkan Agama: Solusi atau Ancaman*, Yogyakarta: Penerbit Grha Guru, Cet. I, 2008.
- Sumartana, Th., Noegroho Agung dan Zuly Qodir (ed.), *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar-Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2002.
- Tibi, Bassam, Islamism and Islam, diterjemahkan oleh Alfathri Adlin dengan judul *Islam dan Islamisme*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2016.
- Toisuta, Hasbollah, *Robohnya Baileo Kami Refleksi Atas Persoalan Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas Masyarakat Maluku*, Yogyakarta: Idea Press, Cet. I, 2010.
- Trijono, Lembang, *Keluar dari Kemelut Maluku Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*, Yagyakarat: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2001.
- Turmudi, Endang & Sihbudi, Riza, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2005.
- Umar, Nasaruddin, *Islam Nusantara Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Cet. I, 2019.
- Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan

- Bhineka unggal Ika dan *The Wahid Institute*, Cet. I, 2009.
- Waileruny, Semual, *Membongkar Konspirasi Konflik Maluku*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. II, 2011.
- Wahid, Abdul, Sunardi & Sidik, Muhammad Imam, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. I, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, Cet. I, 2012